

**KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA DALAM  
MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI TAHUN 2021**

**(Studi Kasus di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Selly Sekarharum Putri**

1906016058

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Selly Sekarharum Putri menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 Studi Kasus di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang atau pun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Desember 2022

Yang Menyatakan

Selly Sekarharum Putri

NIM 1906016058

#### NOTA PEMBIMBING

Lamp: 5 (lima) Eksemplar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama: Selly Sekarharum Putri

NIM: 1906016058

Jurusan: Ilmu Politik

Judul Skripsi: Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Batusari, Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen).

Dengan ini setelah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 11 Desember 2022

Pembimbing 2,

Pembimbing 1,



Solkhah Mufrikah M, Si



Yamin Darsyah M, Si

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA DALAM MENGELOLA**  
**BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI DESA**  
**BATURSARI, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK)**

Disusun Oleh

**SELLY SEKARHARUM PUTRI**

**1906016058**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah dinyatakan lulus.



**Moh. Khasan, M.Ag**

**NIP. 197412122003121004**

Sekretaris

**Moh. Yamin Darsyah, M.Si**

**NIP. 198409092019031007**

Penguji Utama

**Mohammad Mahsun, M.A**

Pembimbing I

**Sholkah Mufrikah, M.Si**

Pembimbing II

**Moh. Yamin Darsyah, M.Si**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan doa dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak Frandy dan Ibu Anita Trini Hayati yang telah membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mendoakan saya untuk senantiasa dipermudah segala urusan dan dikabulkan semua doa-doa saya, dan yang selalu mendukung segala keputusan yang saya pilih

## **MOTTO**

*“It’s fine to celebrate success, but it’s more important to learn from failure” – Bill Gates*

“Aku tidak pernah memikirkan tentang kegagalan, tapi saat itu terjadi, satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukannya dengan baik. Itu kewajibanku untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Kita semua mengalami kegagalan dalam hidup” – Muhammad Ali.

## **ABSTRAK**

Covid-19 yang telah melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020. Sebagai usaha untuk menangani dampak ekonomi di Indonesia, maka Kemensos menciptakan program Bantuan Sosial Tunai. Namun, berbagai bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan bantuan sosial. Di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Bantuan sosial yang diberikan pemerintah dirasa masih kurang cukup karena jumlah masyarakat menengah ke bawah di Desa Batusari tergolong banyak, sehingga beberapa warganya tidak memperoleh bantuan sosial. Selain itu, adanya kecemburuan sosial pada masyarakat di Desa Batusari yang tidak terdaftar pada program keluarga penerima manfaat (KPM). Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dengan teori kepemimpinan situasional Fiedler terhadap kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola BST Tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Metode pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini narasumber dipilih secara *random sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu teori kepemimpinan situasional Fiedler. Teori kepemimpinan situasional Fiedler menjelaskan dua aspek penting pada kepemimpinan situasional yaitu *Leadership Orientation* dan *Situation Favorability*.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST yaitu lebih berorientasi pada hubungan (*relationship oriented*) dimana Kepala Desa Batusari memiliki karakter yang baik dalam bersosialisasi dengan bawahannya. Sesuai dengan model *situation favorability*, Kepala Desa Batusari dikategorikan dalam kategori 4 yang berarti kepemimpinan tersebut berada pada situasi moderat. Sedangkan tantangan yang dihadapi Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST yaitu kurangnya komunikasi yang baik dengan RT/RW, kurangnya pemahaman BST, dan DTKS yang tidak diperbarui.

**KATA KUNCI: Kepala Desa, Kepemimpinan, Bantuan Sosial Tunai**

## ABSTRACT

*Covid-19 which has hit almost all over the world including Indonesia since early 2020. As an effort to deal with the economic impact on Indonesia, the Ministry of Social Affairs created the Cash Social Assistance program. However, the various social assistance provided to people exposed to Covid-19 are inseparable from the various problems that occur in the management of social assistance. In Batursari Village, Mranggen District, Demak Regency, social assistance provided by the government was felt to be insufficient because the number of middle and lower class people in Batursari Village was relatively large, so that some residents did not receive social assistance. In addition, there is social jealousy among the people in Batursari Village who are not registered with the beneficiary family program (KPM). This phenomenon is interesting to study with Fiedler's situational leadership theory on the political leadership of village heads in managing the 2021 BST in Batursari Village, Mranggen District, Demak Regency.*

*The method in this study is the qualitative method, where this research uses a case study approach. Collecting data in this study through interviews and documentation. In this study the informants were selected by random sampling. Data analysis was carried out by describing phenomena from data obtained in the field and associated with the theory used, namely Fiedler's situational leadership theory. Fiedler's situational leadership theory explains two important aspects of situational leadership, namely Leadership Orientation and Situation Favorability.*

*The results of this study indicate that the leadership of the Head of Batursari Village in managing BST is more relationship oriented where the Head of Batursari Village has good character in socializing with his subordinates. In accordance with the situation favorability model, the Head of Batursari Village is categorized in category 4, which means that the leadership is in a moderate situation. Meanwhile, the challenges faced by the Head of Batursari Village in managing BST are the lack of good communication with RT/RW, lack of understanding of BST, and DTKS that is not updated.*

***Keyword: Village head, Leadership, Cash social assistance***

## **KATA PENGANTAR**



*Assalamualaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 Studi Kasus di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak*". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan ini dan dalam proses penyusunan skripsi, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan berbagai ilmu selama penulis menuntut pendidikan di jurusan ilmu politik FISIP Uin Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis di dalam perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan berbagai ilmu dan dukungan pada penulis dalam hal perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Ibu Solkhah Mufrikah, M.Si dan Bapak Yamin Darsyah, M.Si yang telah membimbing, mendukung, memotivasi, dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lancar.

6. Segenap jajaran Bapak/ Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan pada penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala urusan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Batusari yang telah mengizinkan dan menginformasikan penulis untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
9. Segenap perangkat Desa Batusari, Dinsos Kabupaten Demak, TKSK Mranggen, Kepala Pos Indonesia Cabang Mranggen, dan narasumber masyarakat Desa Batusari yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi dalam wawancara, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Frandy dan Ibu Anita Trini Hayati, dan saudari kandung penulis, Lianita Anggraini Putri, Melly Sekarwangi Putri, Azahra Meilin Dahlia Putri, dan Lifarani Akasya Cenna Putri yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan cinta pada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan saudari-saudari penulis selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
11. Rekan-rekan ilmu politik B dan seluruh rekan prodi ilmu politik 2019 yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, bercanda tawa, dan semangat bagi penulis. Semoga dilain kesempatan kita dapat kembali bertemu dan sudah sukses.
12. Sahabat penulis dalam berkeluh kesah dan mengantar penulis untuk mengerjakan skripsi baik wawancara atau mencari data, Rezka Nur Satyo. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hidup dan dapat mencapai apa yang diinginkan.
13. Sahabat penulis dalam berkeluh kesah, menghibur, menemani bermain games dan selalu memberi dukungan, Andika Pramana Putra. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hidup dan dapat mencapai apa yang diinginkan.
14. Teman-teman seperjuangan penulis, Jelita Preeslyana, Faradilla Nurahma, Auliya Saabiqotul Faizah, Yanun Anbiya, Anggita Febriyana, Rifki Ali Azis, Cecep Nugroho, dan teman-teman yang lain, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani perkuliahan ini. Semoga ikatan pertemanan ini terus terjaga dan sukses untuk kalian kedepannya.

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih.

Penulis sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan sangat berarti bagi penulis agar skripsi ini memperoleh peningkatan kualitas dan dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 11 Desember 2022

Penulis

Selly Sekarharum Putri

NIM: 1906016058

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sumber dan Jenis Data .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Teknik Analisis Data.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11

BAB II.....	14
KERANGKA TEORI.....	14
A. Kepemimpinan Politik .....	14
B. Teori Situasional Fiedler.....	17
BAB III.....	22
LANDSCAPE DESA DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI DESA BATURSARI, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK.....	22
A. Gambaran Umum Desa Batursari.....	22
1. Sejarah Desa Batursari .....	22
2. Visi dan Misi Desa Batursari.....	22
3. Kondisi Geografis Desa Batursari .....	23
4. Kondisi Demografis Desa Batursari .....	25
5. Kondisi Sosial Budaya di Desa Batursari .....	25
6. Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Batursari .....	26
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batursari .....	27
8. Kondisi Ekonomi di Desa Batursari .....	28
9. Profil Kepala Desa Batursari .....	28
B. Bantuan Sosial Tunai di Desa Batursari .....	30
1. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Desa Batursari .....	30
2. Syarat Penerima Bantuan Sosial Tunai .....	31
3. Mekanisme Pendistribusian dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai.....	31
4. Besaran dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai di Desa Batursari Tahun 2021.....	33
BAB IV .....	34
KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA DALAM MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHUN 2021 DI DESA BATURSARI .....	34
A. Kepala Desa Batursari Dalam Proses Pendataan Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021	

B. Kepala Desa Batarsari Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 .....	39
C. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 di Desa Batarsari.....	44
BAB V.....	52
TANTANGAN YANG DIHADAPI KEPALA DESA BATURSARI DALAM MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHUN 2021 .....	52
A. Tantangan dalam Berkomunikasi Dengan Bawahannya.....	52
B. Tantangan dalam Pemberian Keputusan Untuk Penyelesaian Masalah .....	55
C. Tantangan Dalam Koordinasi dengan Pihak-pihak yang Terlibat Pada Program BST .....	57
BAB VI .....	60
PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Presentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Desa Batarsari .....	25
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Batarsari Menurut Kelompok Umur .....	25
Tabel 3 Program atau Sumbangan Sutikno Selaku Kepala Desa Batarsari.....	29
Tabel 4 Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batarsari Tahun 2021 .....	33
Tabel 5 Jaringan Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST).....	34
Tabel 6 Sistematika Jaringan Pendataan BST .....	39
Tabel 7 Sistematika Jaringan Penyaluran BST .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Kontingensi Kepemimpinan Fiedler .....	19
Gambar 2 Peta Desa Batusari.....	23
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.....	27
Gambar 4 Surat Izin Penelitian .....	67
Gambar 5 Surat Izin Penelitian .....	68
Gambar 6 Surat Izin Penelitian .....	69
Gambar 7 Dokumen Laporan Normatif Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 .....	70
Gambar 8 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Batusari.....	70
Gambar 9 Dokumentasi Wawancara Dengan Kaur Perencanaan .....	71
Gambar 10 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mranggen.....	71
Gambar 11 Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Desa Batusari.....	72
Gambar 12 Dokumentasi Acara Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 .....	72



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepemimpinan merupakan suatu hubungan yang saling berpengaruh di mana seorang pemimpin membimbing dan mengarahkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu selama periode waktu tertentu. Kepemimpinan berhubungan dengan pengaruh dan kekuasaan, sehingga seorang pemimpin seharusnya menggunakan kekuasaan dengan memberi pengaruh positif dan membimbing bawahannya untuk tujuan yang baik (William, 1994). Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi suatu kelompok dengan kecakapan-kecakapan pribadinya untuk mengerahkan upaya bersama menuju pencapaian sasaran-sasaran tertentu (Rivai, 2014).

Kindleberger menganggap “tanggung jawab” merupakan ciri khas dari kepemimpinan (William, 1994). Ia beranggapan dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan tidak dapat didasarkan pada paksaan dan kekerasan. Kesuksesan dalam kepemimpinan yaitu membangun dan memupuk nilai, minat, dan keyakinan bersama. Seorang pemimpin harus mampu membangun pola interaksi yang baik dan luas dengan bawahannya selama periode tertentu. Pola interaksi yang baik antara pemimpin dan bawahan dalam manajemen yaitu dengan berorientasi pada tugas yang akan meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh bawahan. Selain itu, pemimpin dapat mendidik dan memberikan pelatihan kepemimpinan pada bawahannya dengan tujuan bawahannya tersebut diharapkan mampu memberi pengaruh yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi kemajuan organisasi (Annas, 2014).

Kepala desa merupakan seorang pemimpin yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa memiliki peran yang penting dalam

mendistribusikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak Covid-19 karena ia lebih memahami karakter dan kondisi masyarakatnya. Kepala desa lebih memahami terkait data warga yang terdampak Covid-19 di wilayahnya sehingga ia memiliki data penerima bantuan sosial yang terverifikasi jelas sesuai dengan kriteria dan penyalurannya dapat diberikan pada warga yang mendapatkan bantuan sosial tersebut (Malau, 2020).

Jayani (2021) menjelaskan berdasarkan data Worldometer, kasus Covid-19 yang melanda Indonesia telah mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2021. Pada September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.174.216 jiwa dan menjadi yang terbesar keempat di Asia. Pada April 2020, pemerintah membuat kebijakan yaitu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ketika laju infeksi virus Covid-19 melonjak, Presiden Jokowi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada Juli 2021. Masyarakat Indonesia diharuskan melakukan kegiatan bekerja maupun sekolah dari rumah (*work from home*).

Sebagai usaha untuk menangani dampak ekonomi di Indonesia, maka pelaksanaan program bantuan sosial tunai berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Menangani Dampak Covid-19. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah Jabodetabek. Sedangkan bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah Jabodetabek. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/ kota (Kemensos, 2020).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan terdampak Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) bantuan tersebut diberikan pada 9 juta penerima manfaat dengan nilai besaran bantuan sosial tunai yaitu senilai Rp 600.000/KPM/bulan selama 3 bulan pada tahun 2020. Pemerintah menilai bahwa pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda, sehingga melalui Kementerian Sosial, pemerintah masih melanjutkan penyaluran bantuan sosial

tunai (BST) yang akan dilanjutkan selama 6 bulan pada periode Januari-Juni 2021. Sasaran program meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia. Bantuan sosial tunai tahun 2021 menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan nilai Rp 300.000/KPM/bulan. Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran dengan besaran Rp 12 Triliun (Setiawan, 2020). Tambahan bantuan sosial tunai atas usulan Pemerintah Daerah sebanyak 5,9 juta KPM yang belum terdaftar pada penerima bantuan Kartu Sembako dan diluar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan tersebut diberikan untuk periode 6 bulan dengan jumlah Rp 200.000/KPM/bulan. Total dana yang telah disiapkan mencapai Rp 7,08 Triliun (Kompas.com, 2021).

Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan-bantuan lain dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja. Penerima bantuan sosial tunai memiliki kriteria yang ditentukan pemerintah dan sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Pendistribusian bantuan sosial tunai dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui himpunan bank milik negara (Himbara) melalui rekening penerima manfaat dan melalui PT Pos Indonesia dengan salur BST di kantor pos masing-masing daerah tempat tinggal penerima manfaat (Rosadi, 2021).

Tujuan program bantuan sosial tunai yaitu untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan sosial ini disalurkan pada seluruh wilayah di Indonesia dan ditujukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Ademulales (2022) menjelaskan beberapa kriteria masyarakat penerima bantuan sosial yang ditentukan oleh pemerintah yaitu:

1. Penerima manfaat merupakan masyarakat desa yang terdaftar dalam pendataan RT/RW.
2. Penerima manfaat adalah masyarakat yang terdampak Covid-19, misal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan penghasilan secara drastis, keluarga meninggal akibat Covid-19, dll.
3. Penerima manfaat tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya secara ganda seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dll.

4. Apabila calon penerima tidak menerima bantuan sosial dari program lain tetapi tidak terdaftar di RT/RW, maka menghubungi perangkat desa.
5. Calon penerima yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan bantuan sosial namun tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka wajib memberikan alamat lengkap kepada RT/RW.

Pada kenyataannya beberapa daerah di Indonesia, penyaluran bantuan sosial tidak berjalan sesuai dengan aturan pemerintah karena kurangnya pengawasan. Berbagai bantuan sosial memungkinkan mengalami ketimpangan dalam menyalurkan bantuan sosial seperti adanya penerima bansos ganda seperti yang telah ditentukan bahwa penerima tidak boleh ganda. Selain itu, pengelolaan bantuan sosial tidak merata seperti masih banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan bantuan sosial namun masyarakat menengah keatas yang mendapatkan bantuan sosial, padahal dalam ketentuan tertulis bantuan sosial tersebut ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah (Zega, 2020).

Seperti yang terjadi di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak berbagai bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah dirasa masih kurang cukup karena jumlah masyarakat menengah ke bawah di Desa Batusari tergolong banyak, sehingga beberapa warganya tidak memperoleh bantuan sosial. Selain itu, adanya kecemburuan sosial pada masyarakat di Desa Batusari yang tidak terdaftar pada program keluarga penerima manfaat (KPM) (Wawancara, Sutikno, Kepala Desa, 2022). Dalam kasus lainnya, beberapa masyarakat menengah ke atas di Desa Batusari justru mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah (Wawancara, A, Pedagang, 2022).

Desa Batusari merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas ketiga dari 19 Desa di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu 6,57 km<sup>2</sup>. Desa Batusari merupakan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Mranggen dengan presentase sebesar 22,06%. Penduduk laki-laki berjumlah 19.293 jiwa dan perempuan berjumlah 19.468 jiwa, sehingga total penduduk di Desa Batusari pada tahun 2020 yaitu 38.761 jiwa. Pada wilayah administratif di Kecamatan Mranggen yang terbagi dalam 5 Desa, Desa Batusari memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak yaitu 40 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 337 RT. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, tentunya masyarakat menengah kebawah di Desa Batusari merupakan masyarakat terbanyak di Kecamatan Mranggen. Maka, kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan bantuan sosial tunai sangat penting agar pengelolaan tersebut berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepemimpinan politik Sutikno selaku kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Sutikno selaku Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Sutikno selaku Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa wawasan ilmu pengetahuan, referensi, dan informasi tambahan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian.

## 2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan pada peneliti dalam memahami pentingnya kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai tahun 2021.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Berikut merupakan tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Berdasarkan kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengelola bantuan sosial.**

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Widyaningrum (2020) dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teori hukum empiris. Peran yang dijalankan kepala Desa Kapiteran yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada warga desa terkait bantuan yang diterima masyarakat dengan membentuk tim untuk menginformasikan bantuan-bantuan yang akan didapat, ketua RT menjelaskan pada warga dan melakukan pendataan warga Desa Kapiteran, kemudian melaksanakan musyawarah desa untuk finalisasi data, terakhir ketua RT memberi informasi pada warga mengenai pengambilan bansos tersebut di kantor pos Kemiri. Perbedaan pada penelitian Widyaningrum dengan penelitian ini terletak pada teori penelitian dan fokus penelitian. Teori penelitian Widyaningrum yaitu hukum empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan Fiedler. Fokus penelitian Widyaningrum terkait dengan dana Bantuan Langsung Tunai, sedangkan penelitian ini berfokus pada kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai.

*Kedua*, penelitian oleh Zega (2020) dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori kemiskinan dan teori Aristoteles. Dampak Covid-19 terhadap masyarakat desa yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, barang jual menjadi langka, melemahnya sektor pariwisata, dan organisasi-organisasi yang ada di Desa Maziaya menjadi tidak aktif. Kepala desa sebagai seorang pemimpin menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Desa Maziaya.

Dalam mendistribusikan bantuan sosial dari pemerintah pusat, kepala desa harus mampu memiliki perilaku adil baik dalam keadilan moral maupun prosedural. Perbedaan penelitian Zega dengan penelitian ini yaitu pada teori penelitian. Teori penelitian Zega menggunakan teori kemiskinan dan teori Aristoteles, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori situasional Fiedler.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Azizi, dkk (2020) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan BST di Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Muntang Kabupaten Purbalingga”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teori situasional. Berdasarkan hasil penelitian Azizi, dkk yaitu kepemimpinan kepala desa bersifat legal formal dan patuh pada norma, dalam pengelolaan BST di Desa Muntang diatur berdasarkan KEPMENSOS RI Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pembagian BST dan Sembako. Kepemimpinan kepala Desa Muntang dalam menghadapi situasi di masyarakat yaitu berusaha untuk tetap responsif dan bertanggung jawab berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, dalam menanggapi aduan masyarakat, kepala desa melaporkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan persoalan. Perbedaan pada penelitian Azizi, dkk dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Penelitian Azizi, dkk berfokus pada pemimpin yang menghadapi situasi masyarakat dalam pengelolaan BST dan sembako, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola BST, serta faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan BST.

## **2. Berdasarkan Efektivitas Pengelolaan Bantuan Sosial**

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Rosadi (2021) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori *Welfare State* dan teori krisis ekonomi. Dalam penelitian Rosadi menganalisa tentang krisis ekonomi yang melanda warga RT 02 RW 03 dimana mereka mengalami penurunan pendapatan karena PHK sehingga pemerintah berupaya membantu masyarakat dengan mengadakan bantuan sosial. Warga RT 02 menganggap bahwa pemerintah telah aktif membantu pada masa pandemi ini karena selain program BST ada pembagian beras 10 kg dan telur ayam kepada masyarakat di lingkungan RT 02. Keefektifan program BST di RT 02 sudah sesuai tujuan, terintegrasi, tepat sasaran, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perbedaan

penelitian Rosadi dengan penelitian ini yaitu pada teori penelitian. Pada penelitian Rosadi menggunakan teori *Welfare State* dan teori krisis ekonomi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan situasional.

*Kedua*, penelitian oleh Ademulales (2022) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Tahun 2020”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas dan teori pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kelurahan Pagesangan berjalan secara efektif dan bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mempertahankan hidup di masa pandemi Covid-19. Dengan teori efektivitas dalam penyaluran BST sudah mencapai tujuan sesuai dengan kurun waktu, tepat sasaran, terintegaris dan dapat beradaptasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi yaitu peranan pendamping, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok, dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan penelitian Ademulales dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori penelitian. Teori yang digunakan Ademulales yaitu teori efektivitas dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan situasional Fiedler.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendalami persoalan subjek penelitian (Moleong, 2005). Dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk mengkaji suatu kelompok atau individu, suatu pemikiran, objek, dan suatu kondisi atau peristiwa. Penelitian kualitatif menjelaskan pada suatu keadaan berdasarkan fakta atau “apa adanya”. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah peristiwa atau kejadian yang memiliki keunikan, baik sederhana maupun kompleks (Rahardjo, 2017). Studi kasus pada penelitian ini yaitu di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengangkat data yang ada di lapangan secara sistematis (Syaodih, 2012). Penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang mempelajari tentang latar belakang suatu situasi dan interaksi sosial antar individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Arikunto, 1995). Pentingnya penelitian lapangan untuk melakukan



observasi atau pengamatan terkait suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Maka, penelitian ini akan terkait erat pada studi lapangan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berikut merupakan sumber dan jenis data pada penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2011) data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung pada narasumber penelitian, sehingga data yang digunakan merupakan data mentah. Dalam penelitian ini sumber data penelitian yaitu melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Desa Batusari, Perangkat Desa Batusari, RT/RW Desa Batusari, Dinas Sosial Kabupaten Demak, Kepala Cabang Kantor Pos Indonesia Mranggen, dan masyarakat Desa Batusari.

### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2011) mendefinisikan data sekunder yaitu sumber data dalam memberikan data pada peneliti secara tidak langsung, misalnya dengan perantara orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan antara lain yaitu dokumen pemerintahan dalam bentuk file dokumen digital, foto, artikel, dan lain-lain mengenai topik kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai tahun 2021 di Desa Batusari.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu taktik atau cara untuk memperoleh data pada suatu penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data. Yusuf (2014) menjelaskan bahwa dengan memiliki kemampuan menghayati di dalam suatu situasi sosial akan menciptakan sebuah keberhasilan dalam melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan menanyakan seputar pertanyaan penelitian pada narasumber untuk memperoleh sebuah informasi. Yusuf (2014) menjelaskan wawancara merupakan keadaan dimana proses komunikasi antara penanya dan narasumber melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur memanfaatkan pedoman wawancara dan pertanyaan informal yang dapat ditanyakan oleh

pewawancara dengan cara berbeda. Berikut merupakan narasumber pada penelitian ini.

1. Kepala Desa Batusari: 1 orang
2. Perangkat Desa Batusari: 2 orang
3. Kepala Dusun/ RT/ RW Desa Batusari: 1 orang
4. Dinas Sosial Kabupaten Demak: 1 orang
5. Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mranggen: 1 orang
6. Masyarakat Desa Batusari: 10 orang

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini dengan teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Dari data penduduk Desa Batusari, peneliti mengambil 10 warga desa sebagai responden secara acak untuk diwawancarai terkait dengan bantuan sosial tunai di tengah pandemi Covid-19.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2011) mendefinisikan dokumentasi sebagai cara yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau data yang mendukung penelitian. Dokumentasi adalah pelengkap dalam melakukan wawancara dan observasi. Dokumentasi memiliki kredibilitas yang tinggi dan akan dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari sumber data dan informasi. Dokumentasi tersebut berupa foto-foto pada saat wawancara dan dokumen dari pemerintah desa.

4. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011) menjelaskan dalam penggunaan teknik analisis pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tiga tahapan pada proses analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Dalam mendapatkan informasi dan menyederhanakan suatu data yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu melakukan reduksi data. Data yang dihasilkan pada saat wawancara ataupun dokumen pemerintah tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu data yang dirasa sangat penting dan tidak penting.

Hal tersebut mempermudah peneliti untuk membuang data yang tidak penting, sehingga data tersebut akan menjadi ringkas dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang kemudian dapat di proses ke tahap selanjutnya. Reduksi data diarahkan pada suatu tujuan yang akan ditentukan. Reduksi data juga sebagai proses untuk berpikir secara kritis dan membutuhkan wawancara yang mendalam (Sugiyono, 2011).

b. Penyajian data

Setelah menyelesaikan reduksi data selanjutnya yaitu tahap menyajikan data. Peneliti akan menyediakan data yang tereduksi dengan penyajian data naratif. Kemudian kumpulan data tersebut memuat informasi yang mudah dipahami dan didapat. Proses penyajian ini ditampilkan secara terstruktur sehingga data ini menjadi sebuah informasi. Penyajian data dalam kualitatif berbentuk uraian secara singkat, teks naratif, bagan, dan lain-lain. Dengan melakukan penyajian data, maka data akan terstruktur sehingga dapat dengan mudah dipahami (Sugiyono, 2011).

c. Penarikan kesimpulan

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa kesimpulan akan menjadi kunci jawaban pada rumusan masalah yang disajikan dari awal, namun mungkin juga tidak karena masih bersifat temporer dan akan berkembang ketika melakukan penelitian di lapangan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan menjadi sebuah temuan baru berupa gambaran pada suatu objek yang abstrak sehingga akan menjadi jelas ketika diteliti. Penarikan kesimpulan merupakan tahap penutup dan sebagai informasi yang disajikan dalam laporan pada penelitian. Proses penarikan tersebut dilakukan apabila data-data variatif disusun dan disederhanakan dengan menggunakan suatu media yang kemudian dapat dimengerti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu sebuah rencana penelitian yang memuat rangkaian dan struktur tiap bab atau sub bab dalam penyusunan skripsi dengan menunjukkan hubungan yang sistematis dan logis. Berikut merupakan penjelasan sistematika penulisan penelitian ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan yaitu bab yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode dalam penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

Pada bab ini memuat beberapa teori dalam variabel-variabel penelitian dan teori sebagai kunci utama pada penelitian ini yaitu Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler sebagai landasan analisis data secara rinci dan mendalam tentang bagaimana Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan diteliti.

## **BAB III**

### **LANDSCAPE DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI DESA BATURSARI**

Dalam bab ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum terkait objek pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Gambaran umum tersebut meliputi: kondisi geografis, demografi, gambaran umum lokasi penelitian, profil lembaga desa, dan bantuan sosial tunai di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

## **BAB IV**

### **ANALISA KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA DALAM MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI TAHUN 2021 DI DESA BATURSARI**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan secara mendalam dan komprehensif menggunakan Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler sebagai alat untuk menganalisis terkait kepemimpinan politik kepala desa dalam mengelola bantuan sosial tunai tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

## **BAB V**

### **ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI DESA BATURSARI**

Dalam bab ini berisi analisis terkait faktor pendorong dan penghambat pada pengelolaan bantuan sosial tunai di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Kepemimpinan Politik**

##### 1. Pengertian Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan merupakan kemampuan individu dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah ilmu yang mengkaji secara mendalam terkait cara memengaruhi, mengarahkan, dan mengawasi orang lain untuk melakukan tugas tersebut sesuai perintah yang telah direncanakan seorang pemimpin tersebut. Terry mendefinisikan kepemimpinan adalah aktifitas dalam memberi arahan pada orang lain untuk berusaha dengan suka rela untuk mencapai tujuan bersama (Fahmi, 2018).

Kepemimpinan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia, sehingga dalam kepemimpinan tidak terlepas dengan ilmu politik. Ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang sangat dinamis di dunia. Penggunaan ilmu politik menjadi sering digunakan bagi seseorang yang ingin meraih keinginan dalam kenaikan jabatan, pemilihan, dan hubungan lainnya. Sehingga seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu politik akan membuat kekuasaannya akan mudah digoyahkan. Ilmu politik merupakan ilmu yang menegaskan apabila dalam suatu negara yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dan kuat untuk menciptakan tatanan kehidupan bangsa dan negara secara bermartabat dan berharkat dengan menempatkan kekuasaan pemerintahan untuk berperilaku secara demokratis dan mengutamakan nilai-nilai yang berlaku secara universal (Fahmi, 2018).

Politik merupakan ilmu untuk meraih kekuasaan dan menjadi bagian yang membuat kekuasaan itu bekerja. Dalam menggunakan pengaruh politik untuk mencapai kekuasaan dan tujuan yang diinginkan dengan tujuan positif menjadi hal yang dianggap layak untuk dilakukan maupun diterapkan. Namun, jika dilakukan untuk tujuan negatif maka dianggap mempergunakan politik untuk keuntungan pribadi pemegang kekuasaan. Namun, dalam kondisi darurat, pemimpin akan menggunakan kekuasaannya dengan sah dan bersifat memaksa karena saat terjadi krisis, bawahannya menjadi lebih mudah untuk diperintah dengan apa pun dasar kekuasaan yang digunakan (Hunghe, 2012).

Kepemimpinan politik didefinisikan sebagai kemampuan atau kekuasaan seorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan tersebut tentunya didapat melalui ilmu politik yang telah dimiliki oleh pemimpin. Para

pemimpin dalam mewujudkan keinginannya, menjalankan suatu rencana dengan menerapkan kekuasaan yang dimiliki. Menurut Brantas, seorang pemimpin dalam mewujudkan kepemimpinannya agar efektif perlu melaksanakan dua fungsi utama, yaitu fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas (*task-related*) atau pemecah masalah dan fungsi-fungsi pemelihara kelompok (*group-maintenance*) atau sosial (Fahmi, 2018).

Rivai (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan bawahannya yaitu sebagai berikut.

- a. Kepemimpinan harus melibatkan bawahan atau pengikutnya.
- b. Kepemimpinan harus melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara adil dan seimbang.
- c. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya yang berbeda-beda dalam mempengaruhi tingkah laku bawahannya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab.

## 2. Ciri-ciri Pemimpin

Kualitas seorang pemimpin yang dimilikinya bukan hanya sekadar rutinitas pada tugas dan pekerjaan saja, melainkan pemimpin merupakan simbol dari suatu organisasi. Motivasi dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menggerakkan anggotanya ke arah yang diinginkan, namun jika kualitas pemimpin tersebut kurang mencukupi maka pemimpin hanya memimpin dengan tujuan untuk diri sendiri dan bukan untuk keinginan organisasinya. Untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas dibutuhkan ciri-ciri seorang pemimpin seperti berikut (Fahmi, 2018).

- a. Berkompetensi mengikuti zaman. Pemimpin yang memiliki kompetensi tersebut akan berguna untuk diterapkan pada saat itu dan kompetensi tersebut telah diakui oleh berbagai ahli khususnya.
- b. Paham pada setiap masalah secara mendalam dibandingkan dengan orang lain. Pemimpin tersebut memiliki kemampuan memahami suatu masalah dengan mendalam sehingga mampu memberikan keputusan yang terbaik untuk permasalahan tersebut.
- c. Mampu menerapkan konsep "*The right man and the right place*" secara tepat. Konsep *The right man and the right place* adalah menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Pemimpin

mampu melihat berbagai kemampuan yang dimiliki oleh orang lain dan menempatkan kemampuan tersebut sesuai dengan tempatnya.

Maxwell (2013) mengemukakan sepuluh ciri dari pemimpin, yaitu sebagai berikut.

- a. Karakter. Pemimpin yang memiliki karakter baik yaitu jujur, berintegritas, disiplin, dapat diajari dan diandalkan, tekun, berhati-hati, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, bagaimana pemimpin tersebut berinteraksi dengan orang lain.
- b. Pengaruh. Pengaruh yang dimaksud harus dapat diukur dengan menentukan kualitasnya.
- c. Sikap positif. Pemimpin yang memiliki sifat positif akan bergerak menuju kesuksesan karena ia tidak membatasi diri dan mengerahkan seluruh potensinya sebelum mengaku kalah. Sikap positif dapat menentukan suasana, tak hanya bagi pemimpin sendiri, melainkan juga bagi bawahannya.
- d. Mampu bersosialisasi. Pemimpin mampu bersosialisasi dengan memberi perhatian pada orang lain, memiliki kemampuan memahami orang lain, dan tekad untuk berinteraksi secara positif.
- e. Bakat yang tepat. Pemimpin yang memiliki bakat yang tepat akan memaksimalkan bakat yang dimilikinya.
- f. Riwayat prestasi yang nyata. Pemimpin yang memiliki riwayat prestasi yang nyata maka mampu belajar dari kesalahannya.
- g. Kepercayaan diri. Pemimpin yang memiliki kepercayaan diri maka memiliki karakteristik yang positif. Pemimpin dengan kepercayaan diri yang tinggi mampu mengatasi berbagai masalah dalam situasi apa pun. Pemimpin tersebut mampu menanamkan dan membangkitkan kepercayaan diri pada bawahannya.
- h. Disiplin diri. Terdapat dua disiplin diri yang harus dimiliki pemimpin, yaitu emosi dan waktu. Pemimpin yang efektif akan menyadari bahwa reaksi emosionalnya merupakan tanggung jawab diri sendiri. Pemimpin yang mempunyai disiplin diri selalu berkembang, berusaha meningkatkan diri, dan memaksimalkan penggunaan waktunya.
- i. Keterampilan berkomunikasi yang efektif. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara efektif, maka memiliki interaksi yang positif. Pemimpin harus mampu berkomunikasi pada semua tipe orang.



- j. Tidak puas dengan *Status Quo*. *Status quo* adalah kekacauan yang melibatkan diri sendiri. Pemimpin harus memiliki visi atas apa yang mungkin atau sedang terjadi dan tidak pernah merasa puas. Pemimpin yang menyukai *status quo* akan segera menjadi bawahan. Pemimpin harus mampu melakukan terobosan baru, menaklukkan bidang baru, dan menjauhi *status quo*.

## **B. Teori Situasional Fiedler**

### **1. Teori Fiedler**

Teori situasional merupakan teori yang menekan seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dalam menyesuaikan tuntutan situasi, lingkungan, dan zamannya. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah-masalah aktual karena permasalahan-permasalahan yang tidak terduga dan krisis akan selalu memunculkan satu gaya kepemimpinan yang relevan bagi masa itu. Kepemimpinan situasional harus bersifat *multi dimensional*, yaitu pemimpin harus memiliki sifat yang fleksibel agar dapat melibatkan dan menyesuaikan diri pada masyarakat (Kartono, 2016).

Teori situasional menganggap bahwa kepemimpinan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *pemimpin-pengikut-situasi*. Maka situasi merupakan elemen paling penting karena memiliki jumlah variabel yang paling banyak dan memiliki kemungkinan yang dapat terjadi. Teori situasional kemudian berkembang menjadi teori *situasi-personal* yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan produk dari satu situasi. Kepemimpinan didominasi pada kepribadian pemimpin, bawahannya, dan situasi saat itu dengan peristiwanya. *Field dynamic of leadership* menjelaskan bahwa interaksi antara pemimpin dan situasinya akan membentuk gaya kepemimpinan tertentu. Tugas utama seorang pemimpin adalah untuk mengorganisir situasi yang berbeda-beda dan beradaptasi secara sadar dengan berbagai situasi tersebut (Badeni, 2013).

Teori Fiedler atau teori kontingensi mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain tergantung dengan situasi. Menurut Fiedler, untuk menjadi seorang pemimpin bukan karena sifat bawaan atau kepribadiannya, melainkan karena faktor-faktor situasi dan terjadinya interaksi antara pemimpin dengan situasi yang dihadapinya. Maka dari itu teori ini sering disebut dengan teori situasional di mana teori Fiedler menjelaskan bahwa kepemimpinan tergantung pada situasi, sehingga situasi menjadi pengendali dan pengaruh terhadap

pemimpin. Pemimpin tersebut mencoba memberikan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi tertentu (Zulaihah, 2017).

Teori kontingensi Fiedler juga dianggap sebagai teori situasional yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan pengaruhnya tergantung pada situasi. Seseorang yang menjadi pemimpin bukan karena sifat dari kepribadiannya, melainkan karena beberapa faktor situasi dan interaksi antara pemimpin dan situasinya. Teori Fiedler melihat tinggi rendahnya prestasi kerja dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh motivasi, pengaruh, dan pengendalian dari pemimpinnya. Dengan kata lain, kontribusi seorang pemimpin untuk keefektifan kelompoknya tergantung pada gaya kepemimpinan (*leadership style*) dan kesesuaian situasi yang dihadapinya (*the favourableness of the situation*). Perubahan dimensi yang berbeda-beda menyebabkan situasi dapat bervariasi untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Sehingga strategi yang paling efektif akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lain (Wahyuji, 2013).

Syarifudin (2004) menjelaskan pada aspek situasi dalam teori kepemimpinan Fiedler ada 2 tipe variabel kepemimpinan yaitu *Leader Orientation* dan *Situation Favorability*. *Leader orientation* merupakan kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan (*relationship*) atau berorientasi pada tugas (*task*). Fiedler (1967) menjelaskan dalam *Leader orientation* diketahui melalui *semantic differential scale* dari rekan yang paling tidak disukai dalam organisasi (*Least Preferred Coworker/ LPC*). Skor LPC tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada hubungan dan skor LPC rendah menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada tugas.

Fiedler (1967) memprediksi pada teori ini bahwa pemimpin dengan LPC rendah (gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas) akan lebih efektif dalam situasi kepemimpinan yang menguntungkan (*situation favorability*), dan LPC rendah akan kembali efektif dalam situasi kelompok yang tidak menguntungkan (*situation unfavorability*). Sedangkan pemimpin dengan LPC tinggi (gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan) akan lebih efektif apabila kontrol situasinya moderat atau seimbang. *Situation favorability* adalah tolak ukur sejauh mana seorang pemimpin mampu menghadapi suatu situasi yang terdiri dari tiga faktor utama, yaitu:

- a. Hubungan pemimpin dengan anggota: pemimpin mempunyai dukungan dari bawahan, pemimpin dapat mempengaruhi suatu kelompok dan diterima oleh kelompok tersebut dalam situasi yang menguntungkan.

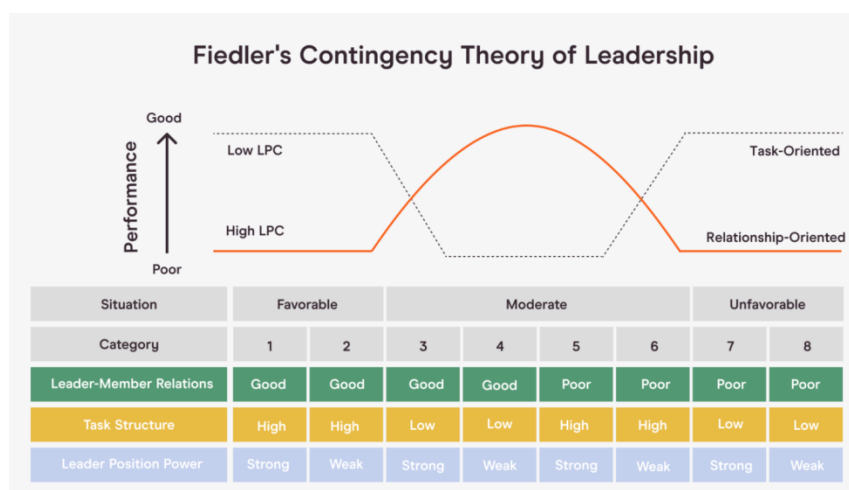
- b. Struktur tugas: pemimpin dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
- c. Kedudukan (posisi): pemimpin mampu menggunakan suatu posisi (jabatan) dengan bijaksana dan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan, sehingga tujuan dari suatu kepemimpinan atau pemerintahan dapat berhasil.

Fiedler menyusun beberapa macam situasi kelompok yang berbeda pada derajat keuntungannya bagi pemimpin (Wahyuji, 2013).

- a. Derajat situasi yang sangat menguntungkan: situasi dimana hubungan pemimpin dengan bawahannya baik, struktur tugas tinggi, dan kekuasaan dalam kedudukan tinggi.
- b. Derajat situasi yang sangat tidak menguntungkan: situasi dimana hubungan pemimpin dengan bawahannya tidak baik, struktur tugas rendah, dan kekuasaan dalam kedudukannya sedikit. Pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, pemimpin dihadapkan dengan ketidakpastian.

## 2. Model Teori Kontingensi Fiedler

**Gambar 1 Teori Kontingensi Kepemimpinan Fiedler**



Sumber: (Fiedler's Contingency Theory, 2000).

Keterangan:

1. Pemimpin dengan skor tinggi dikenal dengan pemimpin LPC tinggi. Artinya, pemimpin tersebut berorientasi pada hubungan. Gaya kepemimpinan pemimpin

LPC tinggi dicirikan oleh keefektifannya dalam membangun hubungan dan mengelola konflik.

2. Pemimpin dengan skor rendah dikenal sebagai pemimpin LPC rendah atau pemimpin yang berorientasi pada tugas. Kepemimpinan berorientasi tugas ditandai dengan kemampuan yang kuat untuk mengatur anggotanya untuk efisiensi dan penyelesaian tugas yang lebih efektif.

Fiedler (1967) memberikan delapan kategori bagi pemimpin, baik LPC tinggi atau LPC rendah dengan tiga situasi yang dihadapinya sebagai berikut.

1. Kategori 1 dan 2 (situasi yang sangat menguntungkan).

- a) Pemimpin LPC tinggi: Pemimpin cenderung berorientasi pada diri sendiri dalam arti mementingkan pengakuan pribadi dan dianggap berhasil sebagai pribadi. Pemimpin tersebut dapat memperoleh pengakuan dan penghargaan pribadi tanpa terlalu banyak kesulitan dalam situasi di mana dia menempati posisi yang kuat dan di mana dia mengendalikan tugas.
- b) Pemimpin LPC rendah: Situasi di mana kelompok menerima pemimpin yang memiliki kekuatan (kedudukan/ jabatan) dan tugas yang terstruktur. Pemimpin tidak khawatir tentang hubungannya dengan bawahannya karena dia merasa diterima dan memiliki semua pengaruh yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Kategori 3-6 (situasi yang cukup menguntungkan)

- a) Pemimpin LPC tinggi: Pemimpin mungkin tidak diterima dengan baik oleh kelompoknya, tugas mungkin tidak jelas dan tidak terstruktur, atau posisi pemimpin mungkin lemah. Salah satu akibat dari situasi yang kurang menguntungkan ini adalah upaya dari pimpinan LPC tinggi yang berorientasi pada hubungan untuk berinteraksi lebih intensif dengan anggota kelompoknya.
- b) Pemimpin LPC rendah: Dalam situasi yang agak lebih sulit dimana tugas kurang terstruktur dengan baik, kekuatan pemimpin terbatas, atau kelompok tidak sepenuhnya menerima pemimpin, pemimpin dengan LPC rendah seperti pemimpin LPC tinggi, kemungkinan akan menjadi agak terancam.

3. Kategori 7 dan 8 (situasi yang sangat tidak menguntungkan)
- a) Pemimpin LPC tinggi: Pemimpin LPC tinggi akan kurang berhasil dalam situasi dimana dia memiliki pengaruh yang relatif kecil. Bawahannya mungkin kurang peduli dengan tugasnya dan menjadi kurang kohesif. Selain itu, kekuatan posisi pemimpin yang lemah tidak lagi cukup untuk membuat anggota tetap sejalan.
  - b) Pemimpin LPC rendah: Pemimpin yang menggambarkan rekan kerja yang paling tidak disukainya dalam istilah yang sangat tidak menyenangkan, sehingga mencoba mendapatkan kepuasan melalui keterlibatannya dengan tugas.

### **BAB III**

#### **LANDSCAPE DESA DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI DESA BATURSARI, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK**

##### **A. Gambaran Umum Desa Batusari**

###### **1. Sejarah Desa Batusari**

Pada masa Kepemerintahan Hindia-Belanda sekitar tahun 1918, terdapat dua wilayah yang dipimpin oleh masing-masing kepala desa yaitu Desa Karanggeneng yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Darmo Pontang dan Desa Pucanggading yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Kasah. Kedua desa tersebut terletak bersebelahan dan memiliki kesamaan baik dari letak geografis, sosial budaya, maupun keagamaan. Perkiraan tahun 1942 Kepala Desa Darmo Pontang meninggal dunia dan Desa Karanggeneng tidak memiliki seorang pemimpin. Kemudian Pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk menggabungkan Desa Karanggeneng dengan Desa Pucanggading dalam satu pimpinan yaitu Kepala Desa Kasah (Batusari, n.d.).

Pada tahun 1989 hingga 2009 dipimpin oleh Kepala Desa H. Kumaidi yang menjabat selama 20 tahun dan berhenti sebab Peraturan Daerah yang tidak memperbolehkan Kepala Desa menjabat hingga lebih dari dua periode. Pada tahun 2009 hingga 2013 dilanjutkan oleh Kepala Desa Lutfi Latif yang kemudian berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir karena tersandung masalah hukum. Setelah kepemimpinan Lutfi Latif, pada tahun 2013 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Sutikno S.E yang dilantik pada bulan November 2013 hingga tahun 2019. Pada periode berikutnya, Sutikno kembali terpilih pada Pemilihan Kepala Desa pada Bulan Desember 2019 hingga saat ini (Batusari, n.d.).

###### **2. Visi dan Misi Desa Batusari**

Ada pun visi dan misi Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut.

###### **1) VISI**

“Mewujudkan Desa Batusari menjadi desa yang berpotensi menopang dan mewujudkan laju pemerintahan secara mandiri melalui peningkatan pendapatan asli desa dan sumber daya manusia yang dimiliki”.

## 2) MISI

### a) Bidang Pemerintahan

- a. Menata administrasi yang berupa buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi, dan bangunan;
- b. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yaitu BPD, LKMD, RW, RT, dan PKK;
- c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

### b) Bidang Pembangunan dan Ekonomi

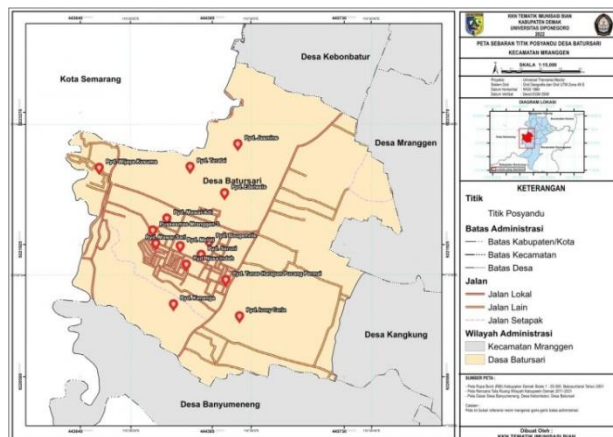
- a. Mewujudkan pembangunan prasarana desa yaitu pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
- b. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan;
- c. Mewujudkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

### c) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menciptakan kerukunan antar umat beragama;
- b. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat;
- c. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Kondisi Geografis Desa Batusari

**Gambar 2** Peta Desa Batusari



Sumber: (UNDIP, 2022)

Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak secara geografis terletak pada koordinat bujur 110.500042 dan koordinat lintang -7.038628 dengan batas-batas sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara: Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen
- 2) Sebelah Timur: Desa Mranggen dan Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen
- 3) Sebelah Selatan: Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen
- 4) Sebelah Barat: Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

Pada luas wilayah Desa Batusari mencapai 6,57 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari:

- Luas Desa Batusari: 651.963 hektar
- Tanah kas desa: 15.75 hektar
- Bengkok Pamong: 46.125 hektar
- Komplek Balai Desa: 0.075 hektar
- Tanah kuburan: 0.250 hektar
- Tanah lapangan: 0.820 hektar
- Sawah masyarakat: 11.960 hektar
- Tegalan: 60 hektar
- Pekarangan penduduk: 38.106 hektar
- Tanah, wakaf, dll: 0.120 hektar
- Tanah Disbun/ Provinsi: 34.23 hektar

Desa Batusari merupakan desa yang sebagian besar kontur tanahnya merupakan tanah datar dan dalam penggunaannya secara umum di dominasi dengan perumahan dan sebagian kecilnya dipergunakan untuk pertanian dan irigasi di wilayah Pucang Gading. Tidak cukup banyak sumber daya alam potensial yang dimiliki Desa Batusari dan diperkirakan hanya 20 persen dari luas desa.



#### 4. Kondisi Demografis Desa Batusari

**Tabel 1 Jumlah Penduduk, Presentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Desa Batusari**

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total	Presentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> )
Batusari	19.293	19.468	38.761	22,06	99,1

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021).

Secara demografis jumlah penduduk di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tahun 2020 merupakan penduduk terbanyak di Kecamatan Mranggen yaitu sebesar 22,06 persen dengan jumlah 38.761 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 19.293 jiwa dan perempuan 19.468 jiwa. Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) di Desa Batusari yaitu 99,1 artinya terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki per 98 penduduk perempuan. Pada tingkat kepadatan penduduk di Desa Batusari mencapai 5.900.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Batusari Menurut Kelompok Umur**

Desa	0-4 Tahun	60 Tahun Keatas	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun Keatas
Batusari	2.629	2.915	8.590	28.561	1.610

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikategorikan sebagai jumlah angkatan kerja yaitu sejumlah 28.561 jiwa. Jumlah angkatan kerja tersebut terbagi dalam beberapa jenis, antara lain adalah jumlah penduduk yang bekerja, angkatan kerja, pengangguran, bukan angkatan kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan jumlah lansia dari usia 60 tahun ke atas dan usia 65 tahun ke atas yaitu sejumlah 4.525 jiwa.

#### 5. Kondisi Sosial Budaya di Desa Batusari

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan anak-anak usia sekolah yang berada di Desa Batusari. Pada Tahun 2020 di Desa Batusari memiliki jumlah TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA yaitu 8 sekolah negeri dan 38 sekolah swasta. Jumlah murid yaitu 8.436 dan jumlah guru yaitu 501.

Dalam mencapai sarana pendidikan bagi masyarakat Desa Batusari termasuk cukup mudah karena transportasi umum sudah masuk desa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Fasilitas kesehatan di Desa Batusari yaitu terdapat 4 poliklinik atau balai pengobatan, 1 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, dan apotek sejumlah 11. Untuk mencapai sarana kesehatan terdekat bagi Desa Batusari termasuk sangat mudah karena rumah sakit di Kecamatan Mranggen memiliki jarak yang dekat dari wilayah desa. Menurut Badan Pusat Statistik, Desa Batusari tidak memiliki warga penderita gizi buruk di tahun 2019 dan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Masyarakat di Desa Batusari mayoritas beragama Islam dengan presentase 72 persen, Kristen sebanyak 11 persen, dan sisanya (Hindu, Budha, dan Konghucu) sebanyak 17 persen. Jumlah tempat peribadatan di Desa Batusari yaitu 23 masjid, 56 musholla, dan 1 gereja Kristen. Lembaga organisasi di Desa Batusari cukup beragam yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pelindung Masyarakat (LINMAS), Karang Taruna, Pengembangan Kesejahteraan Keluarga (PKK), IPNU-IPPNU, Fatayat NU, dan lain-lain (Wawancara, Sutikno, 17 November 2022).

#### 6. Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Batusari

Wilayah administratif Desa Batusari memiliki 5 dusun yaitu Dusun Pucang Gading, Dusun Kayon, Dusun Daleman, Dusun Tlogo, dan Dusun Karang Jati-Karang Malang. Jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak di Kecamatan Mranggen yaitu 40 RW dan memiliki jumlah Rukun Tertangga (RT) terbanyak yaitu 337 RT (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada tata kelola pemerintahan Desa Batusari termasuk rezim pemerintah desa yang bersifat inklusif karena Desa Batusari memberikan ruang partisipasi aktif pada masyarakatnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa yang dilakukan dalam acara musyawarah desa (Musdes) maupun musyawarah dusun (Musdus). Dalam Musdes dan Musdus di Desa Batusari, masyarakat terlibat secara aktif baik kelompok masyarakat rentan dan marjinal (kelompok perempuan, lansia, dan masyarakat miskin) dengan prinsip kesetaraan (Vina, dkk, 2022).

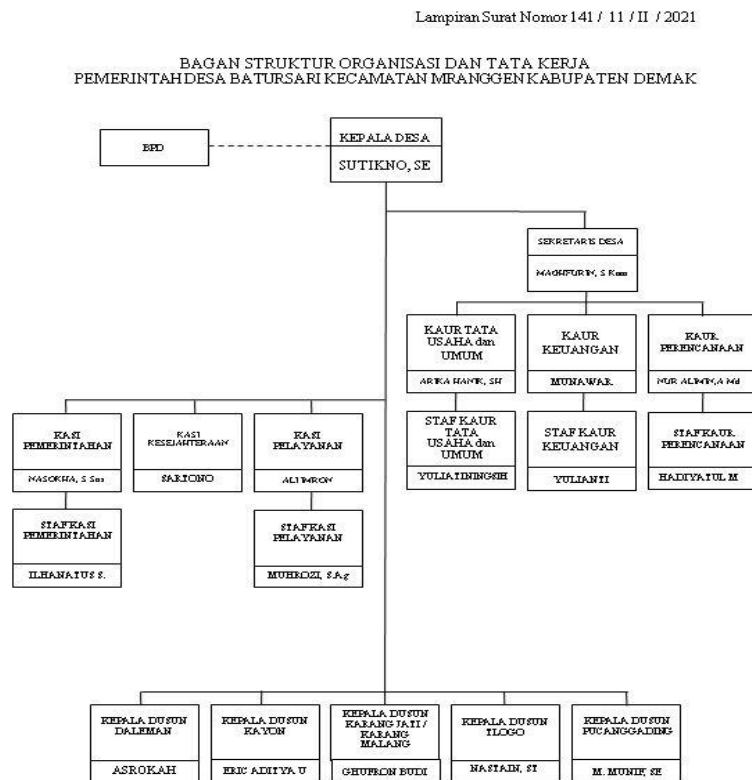
Pada pengelolaan APBDes di Desa Batusari berjalan secara transparan dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Dalam melakukan Musdes dan

Musdus untuk penggunaan dana desa dilakukan dengan skala prioritas. Dalam dua tahun belakangan dana Desa Batusari diprioritaskan untuk menangani virus Covid-19, diantaranya dengan dilakukan penyemprotan *disinfectant*, pembangunan tempat cuci tangan, dan tempat isolasi. Dana desa lainnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan usaha tani yang dilakukan pada dua titik pembangunan, pengembangan pos kesehatan desa dan pengelolaan Posyandu di Desa Batusari (Wawancara, Sutikno, 17 November 2022).

### 7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batusari

Adapun bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebagai berikut.

**Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.**



Sumber: (Desa Batusari, 2022).

## 8. Kondisi Ekonomi di Desa Batusari

Penduduk di Desa Batusari mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, sebagian lainnya adalah memiliki kerajinan, petani, pedagang, dan lain-lain. Hal ini disebabkan wilayah Desa Batusari berada pada perbatasan dengan Kota Semarang, sehingga banyak masyarakat desa yang melaju untuk bekerja di Kota. Selain itu, wilayah di Desa Batusari juga terletak tidak jauh dengan beberapa pabrik industri seperti garment sehingga mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai buruh pabrik.

Banyaknya sarana prasarana ekonomi di Desa Batusari yaitu 11 kelompok pertokoan, 3 pasar dengan bangunan permanen, 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 1 pasar tanpa bangunan, 12 minimarket atau swalayan, 17 toko atau warung kelontong, 7 restoran atau rumah makan, dan sejumlah 252 warung makan. Sedangkan sarana lembaga keuangan yang beroperasi di Desa Batusari yaitu 3 bank umum pemerintah dan 1 bank perkreditan rakyat. Banyaknya koperasi yang masih aktif yaitu 1 Koperasi Unit Desa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Desa Batusari merupakan desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Mranggen dengan jumlah lima dusun yaitu Pucang Gading, Tlogo, Kayon, Karang Jati-Karang Malang, dan Daleman. Jika dilihat dalam tingkat kemiskinan penduduk desa paling banyak warga miskin berada di Dusun Kayon. Dusun Kayon merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan 20,45 persen (Koesbandijah dkk, 2013). Hal tersebut dilihat dari beberapa indikasi seperti ukuran rumah, status kepemilikan rumah, kondisi lingkungan warga, dan lain-lain.

## 9. Profil Kepala Desa Batusari

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat desa setempat. Syaratnya adalah usia minimal Kepala Desa yaitu 25 tahun, harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan harus berdomisili di desa tersebut. Kepala Desa kemudian diangkat oleh Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui calon terpilih .

Sutikno, S.E selaku Kepala Desa Batusari telah menjabat selama 2 periode kepemimpinannya. Pada tahun 2013 mantan Kepala Desa Batusari dengan inisial S tersandung kasus korupsi yang kemudian membuat Sutikno maju menjadi Kepala Desa Batusari hingga masa bhakti tahun 2019. Kemudian kepemimpinan Sutikno sebagai

Kepala Desa berlanjut ketika diadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2019 hingga saat ini. Faktor internal kemenangan Sutikno salah satunya adalah adanya dukungan dari tiga tokoh informal desa, yaitu tokoh agama, pengusaha, dan tokoh pemuda. Ketiganya saling bekerja sama dan mengisi kekurangan satu sama lain untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin dan memperbesar keberhasilan kontestasi. Faktor eksternal keberhasilan Sutikno yaitu reputasi yang ia miliki. Sutikno memiliki reputasi yang baik di Desa Batusari karena peran Sutikno sebagai Kepala Desa yang mendominasi dalam perencanaan program-program pembangunan desa seperti dalam perencanaan proyek bantuan desa (Bandes). Program-program yang telah dilakukan Sutikno selaku Kepala Desa Batusari selama masa bhakti hingga saat ini yaitu sebagai berikut.

**Tabel 3 Program atau Sumbangan Sutikno Selaku Kepala Desa Batusari**

<b>Infrastruktur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>Kesehatan</b>
Pengaspalan beberapa jalan di Dusun Kayon dan Dusun Karang Jati-Karang Malang	Membangun PIAUD di Desa Batusari	Pelaksanaan kegiatan UMKM Desa dengan melaksanakan acara “Pasar Senin” setiap hari Senin.	Pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesehatan masyarakat, kependudukan, dan KB
Pembuatan saluran air		Memberikan fasilitas pelatihan kerja bagi warga yang menganggur.	Pelaksanaan kartu sehat gratis dalam rangka membantu pemerintahan
Perbaikan saluran irigasi			Mengaktifkan kegiatan PKB (Paguyuban Keluarga Berencana) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait KB

Sumber: (Wawancara, Sutikno, Kepala Desa, 2022).

## **B. Bantuan Sosial Tunai di Desa Batusari**

### **1. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Desa Batusari**

Bantuan sosial tunai (BST) merupakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan pada masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk mencukupi kebutuhan pokok. Bantuan sosial tunai adalah bantuan yang berupa uang, barang, atau jasa pada seseorang, keluarga, suatu kelompok atau masyarakat yang tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Program bantuan sosial tunai diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan sosial tunai dilaksanakan pada seluruh daerah di Indonesia kecuali Jabodetabek (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi) (Malau, 2020).

Bantuan sosial tunai diberlakukan pada bulan April tahun 2020 dengan besaran Rp 600.000/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp 300.000/KPM. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat tidak terus bergantung dengan adanya bantuan sosial tunai. Tambahan bantuan sosial tunai atas usulan Pemerintah Daerah sebanyak 5,9 juta KPM yang belum terdaftar pada penerima bantuan Kartu Sembako dan diluar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan tersebut diberikan untuk periode 6 bulan dengan jumlah Rp 200.000/KPM/bulan. Total dana yang telah disiapkan mencapai Rp 7,08 Triliun (Admin, 2021).

Sukoco (2021) Sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Keputusan Menteri Sosial tersebut mengamanatkan pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggung jawab bantuan sosial tunai. Dengan adanya bantuan sosial tunai tersebut diharapkan penggunaan uang tunai tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran pemerintah agar pemberian bantuan sosial secara tunai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pelaksanaan Bantuan sosial tunai di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu dilaksanakan satu bulan sekali dan ada yang dirangkap menjadi dua bulan sekali. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharuskan membawa surat undangan sebagai penerima bantuan sosial tunai yang akan digunakan untuk scan kode QR karena untuk pendataan agar tidak disalahgunakan. Kode QR tersebut hanya dapat di

scan satu kali, maka penerima bantuan sosial tunai dipastikan tidak dapat menggunakan surat undangan tersebut lebih dari satu kali.

Lokasi untuk penyaluran BST di Desa Batusari ditentukan di aula Balai Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Hal tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mencegah persebaran Covid-19 dan memudahkan KPM dalam mengambil bantuan sosial tunai yang diberikan agar tidak berdesak-desakan dan menimbulkan kerumunan. Pelaksanaan pengambilan bantuan sosial tunai selain pihak desa dan kantor pos, juga melibatkan beberapa instansi, seperti Kecamatan, Kepolisian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) setempat (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

## 2. Syarat Penerima Bantuan Sosial Tunai

Adapun syarat-syarat penerima bantuan sosial tunai yaitu sebagai berikut (Kominfo Ngawi, 2019).

- a. Calon penerima merupakan masyarakat yang terdaftar dalam pendataan RT/ RW dan tinggal di domisili.
- b. Calon penerima merupakan masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti kehilangan pekerjaan (PHK), ada anggota keluarga yang meninggal akibat Covid-19, penurunan gaji secara drastis, dll.
- c. Calon penerima sedang tidak mendapatkan bantuan sosial lain dari pemerintah pusat, misalnya Pra Kerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dll.
- d. Apabila calon penerima yang memenuhi syarat, namun belum terdaftar dalam DTKS atau belum mendaftar pada RT/RW, dapat menyampaikannya ke aparat desa.
- e. Apabila calon penerima memenuhi syarat, namun tidak mempunyai NIK dan KTP, tetap dapat mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP, tetapi calon harus berdomisili di desa tersebut.
- f. Bantuan sosial tunai dengan jumlah Rp 300.000 rupiah diberikan pada penerima yang namanya terdaftar di DTKS dan dinyatakan valid.

## 3. Mekanisme Pendistribusian dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

Dalam pendistribusian bantuan sosial tunai, PT. Pos Indonesia memiliki tugas untuk mencetak undangan yang diberikan Badan Pusat Statistik yang disertai barcode sesuai

data dan mengirimkan undangan-undangan tersebut kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota pada seluruh daerah di Indonesia. Kemudian BPS Kabupaten/ Kota membentuk kelompok pendistribusian pada tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan yang masing-masing difasilitasi oleh Bupati/ Walikota dan Camat. Kelompok dalam tingkat Kecamatan terdiri dari BPS, Aparat Kecamatan, aparat Desa/ Kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/ Kota dan BPS Provinsi (Sukoco, 2021).

Penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh kantor pos yang bertempat di masing-masing kecamatan dicairkan untuk pertama kali (tahap pertama) pada bulan April tahun 2020 secara serentak. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan Himbara untuk menyalurkan bantuan sosial tunai karena jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihak kantor pos dalam mengakselerasi penyaluran bantuan sosial tunai melakukan beberapa terobosan sebagai berikut (admin, 2020).

- a. Pada penyaluran bantuan sosial tunai melalui pelayanan kantor Pos Indonesia dalam rangka mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan menghindari kerumunan, maka dilaksanakan di Balai Desa, sekolah, atau tempat yang mendekatkan pelayanan pada penerima manfaat.
- b. Bagi KPM yang tidak bisa hadir karena sakit, lanjut usia, disabilitas, dan lain-lain, maka penyaluran dilakukan dengan pengantaran langsung ke rumah KPM.
- c. Mengadakan perpanjangan waktu pelayanan, yaitu dari pagi hingga malam hari dan pada hari libur.
- d. Melakukan kerja sama dengan Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip, dan lain-lain), Pemerintah Daerah dan aparat kepolisian serta TNI.
- e. Dalam penyaluran pada daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) maka dibayarkan untuk tiga tahap sekaligus agar proses penyaluran berlangsung secara efektif dan meringankan KPM untuk berpergian jauh.
- f. Pos Indonesia melakukan penyaluran bantuan sosial tunai pada daerah khusus seperti pesisir dan pulau-pulau kecil.



4. Besaran dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai di Desa Batusari Tahun 2021.

**Tabel 4 Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batusari Tahun 2021**

Bulan	Jumlah KPM	Besaran BST
Januari	633	Rp 300.000
Februari	633	Rp 300.000
Maret	590	Rp 300.000
April	590	Rp 300.000
Mei	328	Rp 200.000
Juni	328	Rp 200.000
Juli	386	Rp 200.000
Agustus	386	Rp 200.000
September	386	Rp 200.000
Oktober	386	Rp 200.000
November	590	Rp 200.000
Desember	590	Rp 200.000

Sumber: (Wawancara, Zaky, 2 Oktober 2022).

Berdasarkan jumlah penerima BST di Desa Batusari Tahun 2021 dapat diketahui bahwa dalam proses penerimaan BST dilakukan beberapa tahap. Pada proses penerimaan BST tersebut juga mengalami perangkapan dengan beberapa bantuan sosial lain, seperti pengambilan bantuan sosial PKH, BLT Dana Desa, dll. Tahap-tahap tersebut kadang mengalami perangkapan, sehingga dilakukan selama dua atau tiga bulan sekali. Hal tersebut karena pihak desa hanya menunggu konfirmasi BST masuk dari pemerintah pusat.

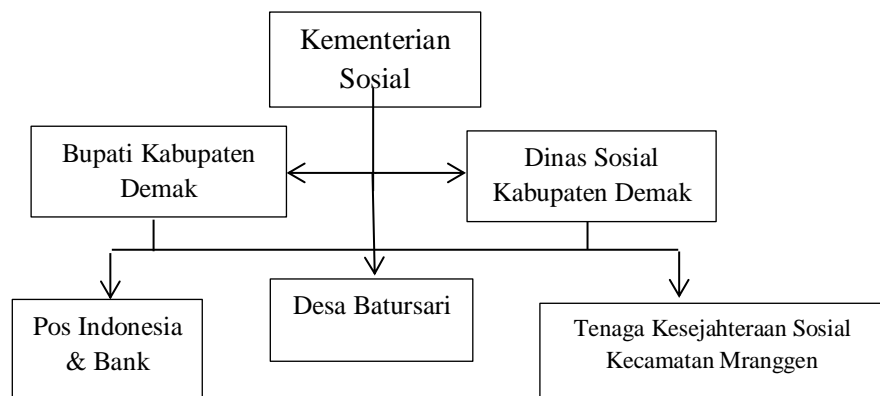
Desa Batusari merupakan desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak di Kecamatan Mranggen dengan total sekitar 1500 KPM. Pada tahun 2020 total penerima manfaat sekitar 1200 KPM. Jumlah KPM mengalami kenaikan karena pandemi Covid-19 yang melonjak di tahun 2021, sehingga menyebabkan bertambah banyaknya masyarakat yang terdampak Covid-19 (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

## BAB IV

### KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA DALAM MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHUN 2021 DI DESA BATURSARI

Pada penelitian ini menganalisis tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam proses pendataan bantuan sosial tunai tahun 2021 di Desa Batusari, penyaluran bantuan sosial tunai di Desa Batusari, dan penyelesaian kendala-kendala yang terjadi selama mengelola bantuan sosial tunai di Desa Batusari. Analisa dilakukan setelah sebelumnya mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dan studi literatur sebagai dokumen pendukung. Analisis ini menggunakan Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler. Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler membagi tiga aspek untuk memahami bahwa suatu keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada cara pemimpin untuk menguasai, mengendalikan, dan mempengaruhi suatu situasi. Tiga aspek tersebut antara lain bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam mengelola bantuan sosial tunai (BST) berdasarkan hubungan dengan bawahannya (perangkat desa dan masyarakat desa), bagaimana Kepala Desa melaksanakan tugasnya dalam mengelola bantuan sosial tunai, dan cara Kepala Desa menjalankan wewenangnya atau memberikan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengelola bantuan sosial tunai. Agar lebih memahami terkait analisa kepemimpinan politik Kepala Desa dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 berikut merupakan jaringan pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST).

**Tabel 5 Jaringan Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST)**



Sumber: Analisis Data Primer

### **A. Kepala Desa Batusari Dalam Proses Pendataan Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**

Pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST), Kementerian Sosial melalui Bupati Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten yang disampaikan melalui Pos Indonesia menyebarkan informasi berisikan surat edaran adanya BST untuk Desa-desanya di Kecamatan Mranggen. Kepala desa selaku pemimpin jalannya pemerintahan desa mendapatkan informasi terkait adanya pemberian BST. Dalam informasi tersebut, diinformasikan pula terkait kriteria keluarga penerima manfaat (KPM), alur pendaftaran sebagai KPM, dan ketentuan-ketentuan lainnya dari pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepala desa dengan perangkat desa atau elit desa yang kemudian bekerja sama untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya BST dari Kemensos.

Adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos diinformasikan oleh Kepala Desa Batusari pada perangkat desa, khususnya kaur perencanaan dan kasi kesejahteraan sosial untuk menginformasikan pada masyarakat Desa Batusari yang belum mendaftar sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan memenuhi syarat-syarat sebagai KPM. Kepala Desa Batusari juga menghimbau untuk RT/RW agar menginformasikan pada warganya. Hal tersebut dibenarkan oleh perangkat Desa Batusari.

“Pertama kali dari Kepala Desa Batusari dibantu dengan saya selaku kaur perencanaan desa dan Pak Sartono selaku kasi kesejahteraan sosial menginformasikan pada RT/RW di Desa Batusari melalui musdes karena Desa Batusari sendiri masyarakatnya sangat banyak dan kalau semua dikumpulkan juga tidak mungkin. RT/RW diminta untuk merekomendasikan calon KPM dan menginformasikan pada warga di lingkungannya bahwa akan diadakan pendaftaran penerima manfaat. Dalam musdes pun RT/ RW yang hadir juga perwakilan karena tempatnya yang terbatas dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Perihal penyebaran informasi pada masyarakatnya dilakukan dengan inisiatif RT/RW masing-masing. Beberapa RT/RW membuat grup dalam aplikasi *Whatsapp* khusus untuk KPM, hal tersebut bertujuan agar memudahkan komunikasi dan mengatur warganya. RT/RW lain melakukannya dengan berinteraksi secara langsung *door to door* ke rumah KPM.” (Wawancara, Alim, 24 November 2022).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam menjalin hubungan kerja dengan perangkat desa selalu melibatkan bawahannya. Sesuai dengan Rivai (2014) yang memaparkan bahwa salah satu faktor penting kepemimpinan yaitu mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang melibatkan bawahannya. Kepala desa memberikan kepercayaan pada rekan kerjanya karena menganggap hubungan dengan perangkat desa bukan hanya hubungan rekan kerja, melainkan sudah dianggap seperti keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara Sartono selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Desa Batusari sebagai berikut.

“Saya sendiri merasa sudah dianggap sebagai cucu sama Kades. Beliau itu saya panggil Mbah Tikno karena karakter beliau ini kalau jaman sekarang disebutnya *friendly*. Jadi tidak sungkan berbicara dengan Kades tapi tanpa mengurangi rasa hormat.” (Wawancara, Sartono, 24 November 2022).

Kepala Desa Batusari mempercayai sepenuhnya pada bawahannya, baik itu Kepala Dusun maupun RT/RW untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki harapan atau percaya pada Kepala Desa Batusari agar mereka terdaftar sebagai KPM dan mendapatkan BST tersebut. Beberapa warga mengaku langsung mendatangi kediaman Kepala Desa Batusari untuk mendaftar langsung atau hanya sekadar bertanya-tanya seputar bantuan sosial. Warga yang berkunjung pada kediaman Kepala Desa Batusari merupakan tetangga, kerabat, atau saudara jauh Kepala Desa Batusari. Salah satu warga desa menilai bahwa Kepala Desa Batusari memiliki karakter pemimpin yang sabar dan terbuka. Ia mengaku kedekatannya dengan sosok Kepala Desa Batusari sangat dekat.

“Kalau saya pribadi langsung ke rumah Pak Kades karena rumah saya dekat sama beliau. Langsung saya tanya-tanya seputar BST, bagaimana caranya agar data saya masuk DTKS. Alhamdulillah Pak Sutikno orangnya terbuka dan sabar mau jelasin bantuan sosial itu ke saya.” (Wawancara, J, 25 November 2022).

Dengan terciptanya situasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Fiedler (1967) bahwa seorang pemimpin dan bawahannya yang memiliki hubungan baik akan sangat berpengaruh pada kepemimpinan yang dijalankan oleh Kepala Desa Batusari karena semakin baik hubungan antara kedua belah pihak dengan dukungan-dukungan yang tercipta dari masyarakat desa berdasarkan kepercayaan tersebut, maka situasi yang dihadapi oleh Kepala Desa Batusari akan sangat menguntungkan.

Pada Proses pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) tentunya melalui pemerintah pusat memberikan tugas dan kewajiban pada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kepala Desa selaku pemimpin pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus memiliki sikap positif, jujur, dan dapat bersosialisasi pada bawahan dan masyarakat khususnya dalam pendataan BST. Desa dalam pendataan BST mengakomodir dari bawah yang kemudian data-data calon KPM tersebut diajukan ke Pemerintah Pusat dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kota/ Kabupaten. Kepala Desa tidak menentukan siapa calon KPM pada program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos. Kepala Desa dalam pendataan BST memiliki tugas untuk memantau proses pendaftaran BST melalui Kaur Perencanaan dan Kasi Kesejahteraan Sosial dalam penugasan RT/RW setempat.

Pada dasarnya setiap lembaga atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari berbagai masalah.. Seperti yang terjadi di Desa Batusari dalam proses pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) masih ditemukan beberapa RT/RW yang lalai pada tugasnya. RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, dimana RT/RW memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melakukan tugas lainnya atas perintah Kepala Desa (UMA, 2022). Kelalaian RT/RW dalam proses pendataan program BST yaitu beberapa masyarakat desa mengaku tidak mengetahui informasi adanya program BST tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan tugasnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar RT/RW dengan Kepala Desa Batusari karena lingkungan tempat tinggal tersebut berada di perumahan elit dimana wilayah perumahan elit mayoritas individunya memiliki karakter individualis sehingga RT/RW kurang melakukan sosialisasi. Faktor lainnya menurut salah satu RT di Desa Batusari yang mengaku kurang mengerti program BST karena ia menjalankan kewajiban RT hanya sebagai relawan dan ditunjuk warganya.

“Kalau di RT saya, gak pernah ada informasi BST dari RT/RW. Tiba-tiba aja udah ada beberapa yang dapat. Kalau saya juga gak pernah komunikasi sama Kepala Desa karena rumah saya jauh dari balai desa atau rumah Kadesnya.” (Wawancara, Punca, 17 November 2022).

“Saya gak pernah dapat informasi BST, denger itu juga dari tetangga yang dapat. Ya gapapa, alhamdulillah masih berkecukupan walau ada beberapa warga yang kaya dan dapat BST. Kalau dari yang saya tahu itu datanya sudah ada tapi menggunakan

data lama jadi yang sudah meninggal pun masih dapat bantuan.” (Wawancara, Rini, 25 November 2022).

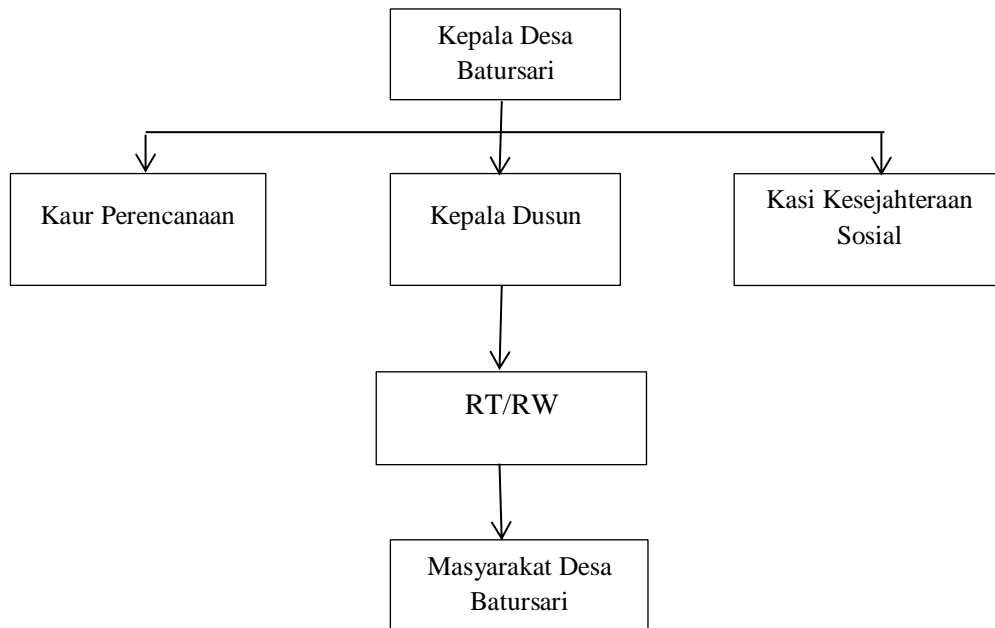
Kepala Desa dalam proses pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 dalam menjalin hubungan dengan bawahannya (perangkat desa dan masyarakat desa) sudah berjalan dengan baik. Tidak ada rekan kerja yang tidak disenangi oleh Kepala Desa Batusari dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun Kepala Desa tidak bersosialisasi langsung ke lapangan dalam pendataan KPM, namun Kepala Desa menerima usul dan keluhan masyarakatnya yang datang ke Balai Desa maupun kediamannya. Situasi ini sesuai dengan pemaparan Fiedler (1967) dimana Kepala Desa Batusari sebagai seorang pemimpin mampu mengendalikan keluhan dari masyarakatnya.

“Selama proses pengelolaan BST di Desa Batusari saya sangat memprioritaskan yang pertama yaitu interaksi. Menurut saya tanpa adanya interaksi atau sosialisasi dengan masyarakat maupun perangkat desa tidak akan berjalan dengan lancar. Karena segala keluhan masyarakat itu saya tampung dan segera diselesaikan secepatnya. Perangkat desa juga sudah saya anggap sebagai keluarga saya karena kita bersama-sama berjuang membangun desa yang maju dan semoga Desa Batusari segera menjadi desa mandiri.” (Wawancara, Sutikno, 17 November 2022).

Hasil penelitian kepemimpinan politik Kepala Desa Batusari dalam proses pendataan KPM untuk terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu Kepala Desa Batusari merupakan pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan bawahannya dimana Kepala Desa Batusari dapat diandalkan dan dipercayai oleh bawahannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Batusari berada pada situasi yang menguntungkan, sesuai dengan pemaparan Fiedler (1967) dimana pemimpin memiliki situasi yang menguntungkan apabila memiliki tingkat hubungan yang baik dengan bawahannya. Hal tersebut juga menguntungkan pada kepemimpinan politiknya karena dengan hubungan yang baik dengan bawahannya akan tercipta dukungan politik pada Kepala Desa Batusari. Disisi lain, Kepala Desa Batusari telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dari Kementerian Sosial dengan mengakomodir data calon KPM dari bawah dan mengajukan ke pemerintah pusat. Namun, ada beberapa RT/RW yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar karena beberapa diantaranya kurang memahami bagaimana alur pendataan BST dan dengan jumlah RT/RW yang sangat banyak di Desa Batusari, maka beberapa RT/RW memiliki intensitas berkomunikasi dengan Kepala Desa Batusari yang sangat kurang, sehingga beberapa masyarakat desa tidak

mendapatkan informasi terkait pendaftaran calon KPM untuk BST Tahun 2021 di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

**Tabel 6 Sistematika Jaringan Pendataan BST**



Sumber: Analisis Data Primer

### **B. Kepala Desa Batusari Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**

Kepala Desa selaku pemimpin pada pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam tugas yang diberikan dari Pemerintah Pusat. Kepala Desa diwajibkan mengakomodir dari bawah terkait pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, Kepala Desa melakukan laporan evaluasi terkait proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan pada Dinas Sosial Kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh pihak ketiga yaitu Pos Indonesia dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditugaskan untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan mengawasi berjalannya proses pembagian BST.

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dilaksanakan di Aula Balai Desa Batusari dengan tujuan untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, pada penyaluran BST Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Pos Indonesia Cabang Mranggen berjalan

secara tidak kondusif, sehingga dari pihak Pos Indonesia meminta agar setiap desa menyediakan fasilitas tempat untuk penyaluran BST. Kepala Desa Batusari dalam berkoordinasi dengan pihak Pos Indonesia memiliki sifat yang kooperatif dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak ketiga yaitu melalui pemberian fasilitas penyaluran BST. Pihak Pos Indonesia Cabang Mranggen mengaku bahwa ada beberapa desa yang sulit untuk bekerja sama dalam memberikan fasilitas lokasi tersebut, sehingga mengalami kendala pada pengambilan BST.

“Kepala Desa Batusari dalam memberikan laporan evaluasi BST sudah baik, sudah sesuai dengan yang kami minta. Kalau dari kami memantau penyaluran BST melalui TKSK ya dan laporan dari Pak Rojikan selaku TKSK Mranggen bahwa di Desa Batusari meski masyarakatnya banyak tapi sudah cukup baik dalam penyaluran BSTnya. Kendala pasti ada ya, namun menurut saya kendala di Desa Batusari termasuk ringan karena rata-rata di desa pasti seperti itu.” (Wawancara, Zaky, 2 Oktober 2022).

Pada wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa Kepala Desa Batusari dalam melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah kooperatif, baik dalam segi komunikasi maupun pelaksanaan tugas. Kepala Desa Batusari juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat di Desa Batusari yang terlibat antara lain Linmas, aparat kepolisian, dan penanggung jawab lapangan yaitu satgas koordinasi lapangan. Berdasarkan pemaparan Fiedler (1967) Kepala Desa Batusari berada pada situasi menguntungkan dimana pemimpin mampu bekerja sama dan melaksanakan struktur tugas dengan baik.

Proses penyaluran BST yang dilakukan di Balai Desa Batusari dilaksanakan secara terjadwal agar pengambilan BST dapat berjalan secara kondusif. Peraturan tersebut melalui Pos Indonesia dengan kesepakatan Kepala Desa Batusari. Namun, pada kenyataannya penyaluran BST di Desa Batusari tidak terlepas dari beberapa hambatan antara lain yaitu penerima KPM yang berhalangan hadir karena satu dan lain hal, proses penyaluran BST mengalami perpanjangan waktu karena saat KPM dipanggil ada beberapa yang tidak mendengar dan belum datang ke lokasi, sehingga harus menyebutkan nama KPM berkali-kali.

“Kan sudah ada penjadwalan dari desa, untuk setiap dusun dibagi waktu hadir. Kalo saya sendiri sebagai KPM ya diberi undangan pasti langsung hadir karena



bansos itu juga buat saya sendiri. Tapi mungkin karena KPM banyak dan balai desa juga ramai, jadi ada yang gak kedengeran kalau dipanggil, apalagi letaknya balai desa kan dipinggir jalan jadi kendaraan berisik berlalu-lalang.” (Wawancara, Y, 25 November 2022).

“Saya tinggal sendirian dan kurang paham bagaimana cara mengambil bansosnya, tapi saya dianter sama bu RW dan diberitahu harus bagaimana. Alhamdulillah sangat terbantu. Kalau komunikasi sama pak kadesnya langsung belum pernah karena sudah ada perwakilan bu RW yang membantu menyampaikan keluhan warga.” (Wawancara, Dewi, 17 November 2022).

Pada wawancara dengan KPM di atas diketahui bahwa dalam proses penyaluran BST di Desa Batursari berjalan dengan cukup lancar, meskipun mengalami perpanjangan waktu. Sedangkan kendala pada pihak pos dengan RT di Desa Batursari yaitu sering terjadi kesalahpahaman (*miss communication*) pada jadwal hadir pengambilan BST. Jadwal yang sudah dibuat pihak pos kemudian melalui Kepala Desa Batursari menyampaikan kepada para dusun. Kepala dusun pun memberikan informasi tersebut pada RT/RW setempat. Namun, beberapa RT tidak menyampaikan dengan baik, sehingga proses pengambilan BST bertabrakan dengan dusun lain.

“Kalau masalah di kami itu pernah ada miskom pada pembagian BST. Sudah diberi jadwal per-dusun tapi RT suka beda penyampaiannya ke warga. Sudah disampaikan Kepala Desa dan pihak pos malah datengnya beda jadwal dan bertabrakan dengan dusun lainnya.” (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

Dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), KPM diminta untuk membawa surat undangan yang diberikan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), setelah syarat administrasi sudah lengkap kemudian KPM diarahkan untuk melakukan scan kode QR. Barcode tersebut sudah ada dalam surat undangan KPM dari Kemensos dengan tujuan untuk menghindari kecurangan seperti pengambilan bantuan secara berturut-turut karena kesengajaan, dan lain-lain. Meskipun penyaluran BST sudah mengalami modernisasi daripada tahun lalu yaitu dengan disediakan kode QR pada surat undangan, hal tersebut justru membuat masyarakat desa bingung dalam penerimaan BST, khususnya pada KPM yang telah lanjut usia dan kurang paham teknologi (Gaptekn).

“Pengambilan BST saya kurang paham disuruh scan seperti itu, apalagi saya juga tidak punya hp jadi saya minta bantuan perangkat desanya. Alhamdulillah perangkat

desanya bisa membantu saya ngambil BST.” (Wawancara, Surni, 24 November 2022).

Pada proses penyaluran BST di Desa Batusari, Kepala Desa Batusari melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan supaya penyaluran tersebut berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Kepala Desa dalam hal ini dibantu dengan pihak-pihak yang terlibat baik pihak pemerintah maupun masyarakat desa. Kepala Desa dalam melakukan pemantauan pada pelaksanaan penyaluran BST melakukan interaksi dengan masyarakat desa atau KPM. Interaksi tersebut dilakukan untuk mengecek kondisiarganya, menerima usulan warga, atau keluhan lain dari warga yang tinggal cukup jauh dari Balai Desa Batusari. Kondisi tersebut merupakan kepedulian seorang pemimpin pada bawahannya, sehingga sesuai dengan Maxwell (2013) bahwa pemimpin yang mampu bersosialisasi adalah pemimpin yang mampu memberi perhatian-perhatian yang diberikan, maka ia adalah seorang pemimpin yang mampu memahami bawahannya dan memiliki tekad untuk berinteraksi secara positif. Kondisi tersebut juga berpengaruh dalam kepemimpinan politiknya dimana Kepala Desa Batusari akan disukai dan mendapat dukungan dari masyarakatnya.

“Dari yang saya lihat karena rumah saya depannya balai desa, saya pernah melihat Pak Tikno mengawasi pengambilan BST. Sempat melihat beliau ngobrol langsung sama warga desa. Ya kalau saya sendiri juga sudah kenal beliau sebagai orang yang terbuka denganarganya.” (Wawancara, Ridho, 23 November 2022).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Batusari, kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam menjalankan tugasnya mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan kondusif, namun warga desa tersebut berharap pada Kepala Desa Batusari untuk lebih memperhatikan tugas RT/RW agar proses penyaluran BST tidak menyita banyak waktu. Bagi perangkat desa, kinerja Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah cukup baik. Kepala Desa Batusari memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif dan kepercayaan diri. Hal tersebut ditunjukkan pada wawancara dengan Alim selaku Kaur Perencanaan Desa Batusari dan Latief selaku Kepala Pos Indonesia cabang Mranggen.

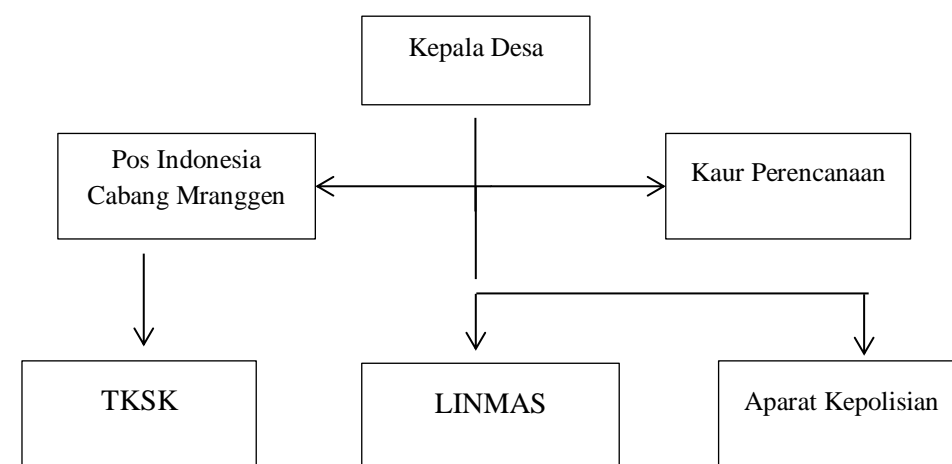
“Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST Tahun 2021 ini lebih baik dari tahun sebelumnya karena beliau mampu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Hanya saja kurang mampu mendisiplinkan bawahannya seperti RT/RW

ada beberapa yang kurang bisa diajak kerja sama.” (Wawancara, Sartono, 24 November 2022).

“Kepala Desa berpengaruh dalam proses penyaluran BST. Sebelum dibagikan juga Kepala Desa selalu berkomunikasi dengan saya untuk persiapan penyaluran bantuan sosial.” (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BST berjalan dengan cukup kondusif, namun Kepala Desa Batusari dalam melaksanakan tugas masih rendah karena mengalami berbagai macam kendala. Beberapa kendala diantaranya yaitu adanya *Miss communication* dari Pihak pos dengan RT terkait jadwal pengambilan BST, terjadi perpanjangan waktu saat pengambilan BST yang menyebabkan antri lama, dan beberapa masyarakat yang kurang paham alur pengambilan BST berdasarkan scan kode QR. Kepala Desa Batusari melakukan pemantauan berkala dan bersosialisasi dengan masyarakat desa dalam upaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakatnya dan apabila dilihat pada kepemimpinan politiknya, dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakatnya, maka dukungan dari bawahannya akan semakin tinggi. Meskipun mengalami kendala dalam penyaluran BST, Kepala Desa Batusari dan bawahannya dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan proses penyaluran BST tersebut dapat terselesaikan hingga penerima akhir. Situasi tersebut sesuai dengan penjelasan Fiedler (1967) bahwa pemimpin yang lebih berorientasi pada hubungan, maka ia akan mampu mengelola konflik-konflik yang terjadi di lapangan.

**Tabel 7 Sistematika Jaringan Penyaluran BST**



Sumber: Analisis Data Primer

### **C. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 di Desa Batusari**

Kedudukan seorang pemimpin sangatlah penting bagi suatu organisasi. Pemimpin memiliki peran yang sangat sentral karena memberikan pengaruh yang besar untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan dan menggerakkan bawahannya serta berkontribusi dalam segala perkembangan suatu organisasi, maka pemimpin tersebut dianggap mampu melaksanakan kepemimpinannya secara efektif. Namun, apabila pemimpin tidak memiliki pengaruh dan hanya menjadi figur, maka keberadaannya menjadi penghambat tujuan suatu organisasi. Kedudukan tinggi dalam suatu organisasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin membuat semua keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut menjadi sangat penting. Sehingga pemilihan keputusan tersebut harus bersifat inovatif, *strategic*, dan tergantung situasi yang dihadapinya (Hardiyansah, 2017).

Pada proses pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan penyaluran BST yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi selama proses pengelolaan BST di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. RT/RW yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai perintah Kepala Desa Batusari.
- b. Kecemburuan sosial bagi masyarakat desa yang tidak mendapatkan bantuan sosial.
- c. Penyaluran BST dirasa tidak tepat sasaran.
- d. *Miss communication* antara pihak Pos Indonesia dengan RT/RW setempat.
- e. Beberapa KPM kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam pengambilan BST.

Pada proses pendataan KPM agar terdaftar di DTKS, beberapa masyarakat desa mengeluh dan protes karena tidak mendapatkan informasi seputar pendaftaran BST. Melalui Kepala Desa dan Kaur Perencanaan ke para Kepala Dusun agar menyampaikan pada RT/RW terkait pendaftaran KPM, namun beberapa RT/RW tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kalau penjadwalan dan pergantian lokasi itu kan karena tahun sebelumnya tidak kondusif. Kepala Desanya meminta saya untuk mengurus masalah tersebut, sehingga penjadwalan ini atas usul Kepala Desa pada pihak pos dan kami yang menyusun

jadwal tersebut. Kepala Desa Batusari sangat kooperatif daripada desa-desa lain untuk masalah lokasi pengambilan BST karena ada beberapa desa yang sulit untuk memberi fasilitas tersebut.” (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

Hasil wawancara dengan Latief selaku Kepala Pos Indonesia Cabang Mranggen menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam menyelesaikan kendala yang terjadi memiliki riwayat prestasi yang nyata. Maxwell (2013) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki riwayat prestasi yang nyata, maka mampu belajar dari kesalahan sebelumnya. Kesalahan sebelumnya adalah terjadinya kerumunan saat pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 yang mengakibatkan penyaluran BST berjalan tidak kondusif. Pos Indonesia atas usul Kepala Desa Batusari, melakukan penjadwalan bagi penerima BST dan membagi lokasi BST. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan, sehingga pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan secara kondusif.

Berdasarkan wawancara dengan Alim selaku Kaur Perencanaan Desa Batusari telah dijelaskan bahwa beberapa RT/RW yang tidak melaksanakan tugasnya yaitu dengan menyampaikan informasi adanya pendaftaran untuk pendataan KPM diberi teguran oleh Kepala Desa Batusari. Kepala Desa Batusari menegaskan untuk lebih peduli dan bersosialisasi denganarganya. Ia juga menghimbau untuk memprioritaskan KPM yang berstatus janda dan anak yatim. Namun, hal tersebut justru menciptakan kecemburuan sosial bagi warga yang tidak menerima bantuan sosial. Kecemburuan sosial terjadi karena masyarakat desa yang tidak mendapatkan BST merasa layak dan seharusnya mereka pantas mendapatkannya. Kecemburuan tersebut juga menyebabkan keresahan dan perasaan kesal pada pemerintahan desa karena dirasa tidak adil dalam pembagian BST. Beberapa keluhan masyarakat desa Batusari adalah sebagai berikut.

“Kalau di RT saya yang dapat kebanyakan dipilihnya janda, padahal yang tidak janda juga butuh bansos. Sudah saya sampaikan usulan saya sebagai KPM sama RT, gatau nanti RTnya menyampaikan ke desa apa tidak.” (Wawancara, Faqih, 25 November 2022).

“Keluarga saya tahun kemarin terdampak Covid-19, suami saya meninggal, saya tinggal sama anak satu tapi tidak dapat bansos padahal katanya sudah sampaikan ke desa. Saya jarang komunikasi sama Pak Sutikno soalnya juga jarang ke balai desa. Kesana kalau ngurus berkas atau dokumen penting saja.” (Wawancara, A, 17 November 2022).

Kecemburuan sosial yang terus menerus terjadi setiap tahunnya, selain melakukan protes pada pihak desa atau bahkan datang pada kediaman Kepala Desa Batusari menyebabkan Kepala Desa Batusari harus turun tangan untuk meminimalisir masalah tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Maxwell (2013) seorang pemimpin harus paham terhadap setiap masalah secara mendalam sehingga dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Kepala Desa Batusari menjelaskan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan akan segera ia bantu dengan memberikan pesangon dari dana pribadinya. Selaku seorang pemimpin tentunya ia tidak ingin masyarakat desanya tidak sejahtera. Kondisi tersebut merupakan salah satu pengaruh pada kepemimpinan politik Kepala Desa Batusari dalam mendapat dukungan politiknya.

Selain terjadi kecemburuan sosial, beberapa masyarakat desa menganggap bahwa penyaluran BST dirasa tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran yang dimaksud adalah masyarakat desa menganggap beberapa KPM merupakan masyarakat desa yang hidupnya sudah berkecukupan, warga yang sudah meninggal tetapi masih mendapatkan, dan warga yang masih berusia produktif atau masih mampu untuk bekerja. Kepala Desa Batusari mengakui bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah program bantuan sosial “mendadak” yang dilakukan pemerintah untuk menunjang kehidupan masyarakat. Kepala Desa sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam melakukan proses pendaftaran calon KPM agar terdaftar pada DTKS. Namun, Kepala Desa tidak dapat mengatasi ke-tidaktepatan sasaran KPM karena pihak yang melakukan verifikasi data adalah Dinas Sosial. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa selaku pengelola BST yang mengakomodir dari bawah.

“Untuk program BST ini memang kurang tepat sasaran karena data yang sudah diupdate oleh desa dan disampaikan ke Kemensos itu nanti datanya balik lagi ke yang sebelumnya. Saya juga sempat mempertanyakan kinerja dingsos, harusnya punya tim yang turun ke lapangan untuk mengecek kelayakan calon KPM. Jadi untuk masalah tidak tepat sasaran pada BST ini saya hanya bisa usul saja karena yang menyeleksi Pusat. Tapi kalau program bantuan dari desa Alhamdulillah sudah tepat sasaran sejenis PKH dan BLT Dana Desa karena yang ngurus kan desanya langsung jadi ada petugas yang turun ke lapangan.” (Wawancara, Sutikno, 17 November 2022).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Batusari dijelaskan bahwa penyaluran BST Tahun 2021 tidak tepat sasaran karena data baru calon KPM melalui desa yang diusulkan ke Kemensos tidak diupdate, sehingga data KPM BST Tahun 2021 merupakan data lama

Tahun 2020. Faktor lainnya yaitu ekonomi warga telah berubah seiring dengan pergantian tahun, sehingga ada yang mengalami kenaikan ekonomi dan justru ada yang mengalami penurunan ekonomi. Hasil penelitian dari wawancara dengan Kepala Desa Batusari dijelaskan bahwa Kepala Desa Batusari tidak membuat kebijakan apapun selama proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) karena kebijakan atau aturan-aturan yang ada sudah diatur oleh Kementerian Sosial selaku pemberi Bantuan Sosial Tunai (BST). Kepala Desa hanya membantu untuk mencapai tujuan dari diadakannya bantuan sosial tersebut agar masyarakatnya terbantu dan bantuan tersebut nantinya bermanfaat bagi masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Dalam hal ini Kepala Desa Batusari tidak membuat peraturan atau kebijakan, hal tersebut tidak sesuai dengan pemaparan Fiedler (1967) bahwa dengan adanya suatu kebijakan, maka tujuan dari suatu kepemimpinan akan mudah berhasil.

Kendala-kendala yang terjadi pada proses pendataan tersebut diatasi oleh Kepala Desa Batusari selaku pemimpin jalannya pemerintahan desa untuk menanggapi protes dan keluhan masyarakatnya melakukan usulan pada pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan data calon KPM. Selain itu, bagi masyarakat desa yang mendapatkan bantuan sosial ganda diminta untuk memilih salah satu bantuan sosial yang didapat karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa KPM tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial ganda.

“Bantuan sosial ganda pasti ada di semua desa. Tapi untuk di Desa Batusari, Kepala Desanya sebelum pembagian bansos langsung meminta kepada pihak pos untuk menyeleksi KPM yang mendapat bansos ganda. KPM harus memilih salah satu bantuan yang akan diterima dan kami pihak pos memberikan surat pernyataan bahwa bantuan sosial yang tidak dipilih untuk dibatalkan pada pemerintah. Jadi tidak ada KPM menerima bansos ganda di Desa Batusari.” (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

Pada proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batusari juga mengalami beberapa kendala, antara lain yaitu *miss communication* antara pihak Pos Indonesia dengan RT/RW, perpanjangan waktu yang menyebabkan antrian lama, dan masyarakat yang kurang paham teknologi kesulitan untuk melakukan scan kode QR. Kepala Desa Batusari mengaku sudah menghimbau para Kepala Dusun untuk lebih menertibkan RT/RW dalam penyampaian segala informasi yang berkaitan dengan masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa berupaya untuk lebih tegas pada masyarakat

desa yang datang terlambat atau kurang memperhatikan antrian, sehingga ia memberi penegasan bahwa bagi KPM yang datang terlambat tidak akan mendapatkan BST atau BST tersebut hangus. Hal tersebut justru membuat masyarakat datang tepat waktu dan meminimalisir antrian lama. Dalam pengambilan BST dengan scan kode QR pun ada tim yang membantu KPM baik pada pihak desa maupun pihak pos.

Hasil pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Batusari dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi saat pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu cukup cepat tanggap dan memiliki pengaruh yang penting karena semua aduan baik pada masyarakat Desa Batusari atau pihak Pos Indonesia menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Kepala Desa Batusari mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama proses pendataan BST dan penyaluran BST Tahun 2021. Disamping menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, kepemimpinan politik Kepala Desa Batusari dalam memberikan pengaruh pada masyarakat desa yaitu dengan melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat desa yang tidak mendapatkan bantuan sosial dengan memberi pesangon dari dana pribadi yang membuat Kepala Desa Batusari memiliki dukungan dari bawahannya. Hasil analisis terkait Kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 memiliki kedudukan (posisi) yang cukup rendah. Hal tersebut karena Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga pembuat kebijakan dan aturan tersebut diatur oleh Kementerian Sosial. Selain itu, Kepala Desa Batusari tidak membuat peraturan SOP selama pengelolaan BST Tahun 2021. Namun Kepala Desa Batusari dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan Kemensos dan membantu pihak Pos Indonesia dalam memecahkan kendala-kendala yang terjadi saat pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam melaksanakan kinerjanya sudah baik. Namun, dalam mengevaluasi kinerja bawahan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) masih kurang maksimal karena banyaknya jumlah RT/RW yang ada di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Sehingga Kepala Desa Batusari diharapkan lebih tegas dalam memberi arahan pada bawahannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Teori Kepemimpinan Situasional Fiedler menjelaskan bahwa dalam *Leader Orientation* terdapat dua tipe kepemimpinan seorang pemimpin yaitu pemimpin yang berorientasi pada hubungan (*relationship oriented*) dan pemimpin yang berhubungan dengan tugas (*task oriented*). *Leader orientation* melalui *semantic different scale* dari



rekan yang paling tidak disukai atau disebut dengan *Least Preferred Coworker* (LPC). Skor LPC tinggi apabila pemimpin berorientasi pada hubungan dan skor LPC rendah apabila pemimpin berorientasi pada tugas. Kepala Desa Batusari selama mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dalam proses pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST), proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dan penyelesaian masalah dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Batusari lebih berorientasi pada hubungan (*relationship*). Sehingga Kepala Desa Batusari termasuk dalam kategori LPC tinggi.

Kepala Desa Batusari memiliki skor tinggi karena keefektifannya dalam membangun hubungan seperti berkomunikasi baik dengan perangkat desa, Pos Indonesia, dan masyarakat Desa Batusari. Selain itu, Kepala Desa Batusari memiliki sifat terbuka pada semua masyarakat desa sehingga masyarakat merasa nyaman ketika mengadu atau memberi usul pada Kepala Desa. Hubungan dengan perangkat desa juga diakui Kepala Desa Batusari sudah seperti keluarga karena sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan. Selain itu, Kepala Desa Batusari mampu mengelola konflik yang terjadi dengan baik. Berikut beberapa faktor Kepala Desa Batusari memiliki skor LPC tinggi yaitu sebagai berikut.

- a) Kepala Desa Batusari mendapatkan dukungan dari bawahannya, baik perangkat desa dan masyarakat desa.
- b) Kepala Desa Batusari mampu membangun hubungan dengan pihak ketiga, seperti Pos Indonesia Cabang Mranggen dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mranggen.
- c) Kepala Desa Batusari mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Batusari, seperti kecemburuan sosial dan ketidak-kondusifan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020.

*Situation favorability* adalah tolak ukur sejauh mana seorang pemimpin dapat menghadapi situasi yang terdiri dari hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kedudukan. Kemudian peneliti menganalisis sejauh mana tolak ukur kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) berdasarkan kategori 1 sampai 8 dari situasi yang sangat menguntungkan, moderat, dan sangat tidak menguntungkan.

Berdasarkan hubungan Kepala Desa Batusari dengan bawahannya, Kepala Desa Batusari memiliki hubungan yang sangat baik dengan perangkat desa maupun

masyarakat desa. Hal ini karena Kepala Desa Batusari memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dengan bawahannya, kemampuan berkomunikasi yang efektif sehingga pemimpin tersebut memiliki interaksi yang positif dan mampu berkomunikasi dengan semua tipe orang. Kepala Desa Batusari selama mengelola BST melakukan perhatian khusus pada masyarakat penerima BST, namun juga memperhatikan masyarakat desa yang tidak terdaftar sebagai calon KPM yaitu dengan memberikan pesangon melalui dana pribadinya. Hubungan yang baik antara Kepala Desa Batusari dengan masyarakatnya dapat peneliti lihat pula melalui ekspresi wawancara di lapangan.

Kepala Desa Batusari saat melaksanakan tugas dalam mengelola BST masih lemah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan program BST. Meskipun, Kepala Desa Batusari cukup sulit untuk mengatur bawahannya setingkat RT/RW hal tersebut tidak membuat Kepala Desa Batusari berhenti untuk tetap memberi arahan dan masukan pada RT/RW agar lebih disiplin. Disamping itu, Kepala Desa Batusari mampu bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pos Indonesia dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pembantu dalam proses penyaluran BST. Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepala Desa Batusari sangat penting pada pengelolaan BST karena aduan atau laporan yang masuk langsung melalui Kepala Desa. Sehingga Kepala Desa Batusari diharapkan agar dapat lebih mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan program BST Tahun 2021.

Kepala Desa Batusari dalam menggunakan suatu posisi atau jabatannya pada pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 masih lemah karena kedudukannya sebagai kepala desa dalam membuat peraturan/ kebijakan tidak digunakan, baik kebijakan BST atau SOP dalam pengelolaan BST. Hal tersebut dibuktikan dengan Kepala Desa Batusari tidak mengeluarkan kebijakan atau peraturan SOP apapun terkait adanya program BST. Kepala Desa Batusari mengaku bahwa ia tidak mau untuk mengelabui Pemerintah Pusat karena program tersebut merupakan program Kemensos, sehingga ia berusaha untuk membantu jalannya pelaksanaan program BST.

Fiedler (1967) memberikan delapan kategori bagi pemimpin, baik LPC tinggi atau LPC rendah. Sehingga hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Batusari dengan skor tinggi atau disebut LPC tinggi yaitu lebih berorientasi pada hubungan. Kepala Desa Batusari memiliki hubungan yang sangat baik dengan bawahannya, struktur tugas dalam pengelolaan BST rendah dan dalam kedudukannya masih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Batusari

dalam mengelola BST dikategorikan pada kategori 4. Kategori empat yaitu Kepala Desa Batarsari cukup diterima dengan baik oleh bawahannya meskipun memiliki tugas yang kurang terstruktur dan posisi yang cukup lemah, sehingga Kepala Desa Batarsari harus berinteraksi lebih intensif dengan bawahannya.

## **BAB V**

### **TANTANGAN YANG DIHADAPI KEPALA DESA BATURSARI DALAM MENGELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHUN 2021**

Pada bab ini akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021. Data lapangan untuk menunjang penulisan ini diambil melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Pada bab ini pengumpulan data dipandu oleh teori-teori yang relevan dan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan sehingga menjadi suatu penulisan yang sistematis dan komprehensif.

#### **A. Tantangan dalam Berkomunikasi Dengan Bawahannya**

Kepala Desa Batusari memiliki berbagai fungsi dalam menjalankan peran dan tugasnya. Peran Kepala Desa sebagai seorang pemimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya dalam mempengaruhi atau menggerakkan kemampuan kerja bawahannya dan masyarakat desa. Seorang pemimpin tentunya dapat menjalankan kepemimpinannya didasari oleh bagaimana pemimpin tersebut mampu berkomunikasi dengan bawahannya dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kepemimpinannya, sehingga kepemimpinan tersebut dapat berhasil. Komunikasi merupakan kunci utama seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tinggi. Sedangkan sebaliknya, komunikasi yang buruk akan menciptakan kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (Rivai, 2014).

Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) tentunya dibantu oleh bawahannya yaitu perangkat desa selama proses pelaksanaan pengelolaan BST. Kepala Desa Batusari tidak akan mampu berjalan sendiri apabila tidak memiliki dukungan dari bawahannya atau pun pengikutnya. Dalam memimpin jalannya pengelolaan BST, Kepala Desa harus memiliki keahlian atau kemampuan dalam berkomunikasi sehingga Kepala Desa mampu menggerakkan bawahannya untuk ikut bekerja secara sukarela tanpa paksaan dalam pelaksanaan BST. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin jalannya roda pemerintahan desa harus membentuk lingkungan yang kondusif sehingga menciptakan keefektifan bekerja dalam mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini Kepala Desa harus melibatkan orang lain baik bawahannya atau pengikutnya (Rivai, 2014).

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui Kepala Desa Batusari selama proses pengelolaan BST Tahun 2021 melakukan komunikasi yang baik dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan di Aula Balai Desa Batusari untuk menginformasikan pada RT/RW dan perwakilan masyarakat desa bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) diperpanjang, syarat-syarat atau kriteria calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianjurkan oleh Kementerian Sosial, dan pengambilan BST melalui pihak ketiga yaitu Pos Indonesia Cabang Mranggen atau melalui rekening yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam hal ini, Kepala Desa Batusari sebagai seorang pemimpin memiliki karakter yang terbuka dan partisipatif dengan memberikan informasi pada program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang akan didistribusikan pada semua masyarakat Desa Batusari. Dalam musyawarah desa, RT/RW atau perwakilan masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan BST.

“Dalam menyampaikan pendapat saya waktu itu, saya berpendapat kalau penyampaian informasi lebih baik menggunakan grup di Whatsapp agar lebih fleksibel. Pak Sutikno menerima masukan saya dan mengajak perwakilan-perwakilan RT/RW untuk menerapkannya. Pak Sutikno itu orangnya memang terbuka dan gak suka basa-basi, jadi kalau emang salah, beliau langsung menegur, kalau memang benar ya memuji jadi menurut saya beliau orang yang jujur apa adanya.” (Wawancara, D, 24 November 2022).

Kepala Desa Batusari menunjuk Kaur Perencanaan sebagai penanggung jawab dalam memimpin jalannya pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui komunikasi dua arah dibawah pengawasan Kepala Desa. Kaur Perencanaan dibantu oleh Kasi Kesejahteraan dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selama proses pelaksanaan BST. Merujuk pada Rivai (2014) bahwa kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan yang melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dengan bawahannya secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, Kepala Desa Batusari melakukan komunikasi yang positif dengan memberikan motivasi dan arahan untuk mendapatkan kepercayaan perangkat desa. Komunikasi yang positif akan berdampak pada proses kinerja Kaur Perencanaan selaku penanggung jawab dalam proses pendataan maupun penyaluran BST. Nur Alim selaku Kaur Perencanaan Desa menjelaskan bahwa dirinya termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh kualitas bekerja yang baik dan memperoleh perhatian khusus dari Kepala

Desa Batusari. Begitu pula yang dirasakan oleh Sartono selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Desa yang mengaku bahwa Kepala Desa Batusari sering memberikan arahan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi.

Menurut Kepala Desa Batusari, keterlibatan perangkat desa maupun lembaga masyarakat desa dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat penting karena selain membantu dalam menyelesaikan permasalahan, perangkat desa dan lembaga masyarakat desa seperti RT/RW lebih banyak mengerti tentang masalah-masalah internal (masalah di kantor desa) atau eksternal (masalah pada masyarakat desa) yang ada di Desa Batusari. Permasalahan tersebut terjadi akibat kegagalan seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya atau terjadi diluar kehendak seorang pemimpin. Dengan terjadinya kendala atau masalah pada suatu kegiatan yang dilakukan, hendaknya pemimpin harus segera mengatasi permasalahan tersebut melalui komunikasi yang baik.

Dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST), Kepala Desa Batusari dengan bawahannya melakukan komunikasi untuk melakukan perencanaan dalam rangka membantu Kementerian Sosial dalam memberikan program BST pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Meskipun telah melakukan komunikasi dalam suatu lembaga atau organisasi, pada proses pendataan calon KPM agar terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), beberapa masyarakat Desa Batusari mengaku tidak mendapatkan informasi terkait pendaftaran calon KPM yang dilakukan di RT/RW setempat.

Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa lalainya RT/RW terhadap tugas masing-masing untuk memberikan informasi pada warga desa di lingkungan sekitarnya menyebabkan penghambat pada kepemimpinan Kepala Desa Batusari. Pada dasarnya dengan terjadinya peristiwa tersebut, masyarakat desa akan protes dan menanyakan kinerja desa yang sebenarnya. Selain itu, pada proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak akan tepat sasaran karena ada beberapa calon KPM yang tidak di data. Kendala lainnya adalah masih dengan kasus yang sama yaitu *miss communication* antara pihak Pos Indonesia Cabang Mranggen dengan beberapa RT/RW di Desa Batusari yang salah menginformasikan terkait jadwal kedatangan pengambilan BST.

“Cukup sulit untuk berkomunikasi dengan semua RT/RW di Desa Batusari karena jumlahnya sangat banyak hingga ratusan, jadi tidak memungkinkan juga kalau dikumpulkan di tempat yang bersamaan. Tapi dari pihak pos dan desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan informasi. Pada desa yang sudah ‘ketauan’

tidak pernah dapat informasi, nanti dari desa ada yang turun ke lapangan untuk menginformasikan.” (Wawancara, Sartono, 24 November 2022).

Kondisi dimana Kepala Desa Batusari cukup sulit untuk berkomunikasi dengan banyaknya RT/RW di Desa Batusari mempengaruhi pengelolaan BST maupun kepemimpinan politik. Bagaimanapun karena Kepala Desa Batusari adalah pemimpin pemerintahan desa, maka setiap masalah yang terjadi, Kepala Desa yang akan menanggung keluhan atau aduan masyarakatnya. Berdasarkan pemaparan Maxwell (2013) bahwa pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif pada semua tipe orang. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pada kepemimpinan Kepala Desa Batusari dimana Kepala Desa belum mampu sepenuhnya untuk berkomunikasi secara efektif pada semua RT/RW di Desa Batusari, sehingga Kepala Desa Batusari cukup sulit mengatur kinerja beberapa RT/RW yang masih lalai pada tugasnya.

#### **B. Tantangan dalam Pemberian Keputusan Untuk Penyelesaian Masalah**

Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) mulai dari proses pendataan hingga penyaluran BST tidak terlepas dari berbagai masalah. Masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Kepala Desa Batusari merupakan tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan Kepala Desa Batusari dalam menyelesaikan masalah merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pengelolaan BST. Bagaimanapun, setiap aduan dari masyarakatnya, seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberikan keputusan atau solusi yang tepat (Maxwell, 2013).

Kurangnya pemahaman terkait fungsi bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah desa menjadikan pola pikir masyarakat berbeda. Beberapa masyarakat di Desa Batusari merasa membutuhkan bantuan sosial yang sebenarnya kondisi keluarga mereka jauh dari kriteria yang ditentukan. Hal tersebut merupakan kecemburuan sosial dimana pola pikir masyarakat desa yang kurang paham terkait kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebenarnya. Permasalahan lainnya adalah masyarakat desa yang tidak memahami fungsi bantuan sosial yang harusnya digunakan. Bantuan Sosial Tunai (BST) dianjurkan untuk digunakan sebaik mungkin pada masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti pembelian kebutuhan pokok. Namun pada kenyataannya, masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan BST tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. BST tersebut digunakan untuk membayar cicilan, membeli barang yang tidak

terlalu dibutuhkan, dan lain-lain. Sedangkan bagi masyarakat desa yang tidak menerima BST memiliki pola pikir yang sama apabila mereka mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal ini dibuktikan dari wawancara beberapa masyarakat Desa Batusari sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat saya gunakan untuk membayar cicilan motor dan makan meskipun besaran bantuannya juga sedikit dan ga cukup juga tapi sedikit meringankan saya.” (Wawancara, Dewi, 17 November 2022).

“Kalau saya gunakan untuk bayar biaya sekolah anak saya karena bapak sudah di PHK dan kerja juga hanya serabutan. Jadi adanya BST menurut saya sudah cukup membantu.” (Wawancara, Tutik, 23 November 2022).

Dari kondisi tersebut sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi cenderung untuk menunggu Bantuan Sosial Tunai (BST). Pola pikir tersebut muncul karena dengan adanya BST membuat KPM menggantungkan dalam hal pembiayaan kehidupannya, padahal bantuan sosial dari pemerintah merupakan bantuan sementara yang sewaktu-waktu akan dihapuskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan wawancara bahwa data KPM pada DTKS tidak diperbarui oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak, hal tersebut selain berpengaruh pada persebaran yang tidak merata, juga mempengaruhi kepemimpinan politik Kepala Desa Batusari. Akibatnya Kepala Desa Batusari mendapatkan protes dan keluhan oleh masyarakat desa karena dianggap tidak adil dalam penyaluran BST. Dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat desa, Kepala Desa Batusari memutuskan untuk berinisiatif memberikan pesangon melalui dana pribadinya untuk masyarakat desa yang tidak terdaftar pada DTKS. Kepala Desa Batusari memberikan kriteria tersendiri untuk warganya yang dirasa sangat membutuhkan bantuan. Dengan adanya keputusan yang diberikan Kepala Desa Batusari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada selama pengelolaan BST, diharapkan masyarakat desa dapat memahami program BST tersebut dan meminimalisir tingkat kecemburuan sosial yang terjadi di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Kepala Desa Batusari mampu menyelesaikan masalah dengan inisiatif sendiri dan bantuan dari bawahannya. Kepala Desa Batusari dalam menangani berbagai keluhan atau usulan bawahannya mampu merespon secara cepat tanggap. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara pada beberapa masyarakat Desa Batusari.



“Untuk menanggapi keluhan atau aduan masyarakat desa, Kepala Desa Batusari responnya cepat. Seperti waktu antrian lama saat pengambilan BST, kan sempat ada warga yang mengadu waktu beliau mengawasi. Itu langsung disuruh kerja cepat perangkatnya. Ada lagi yang waktu RT salah menginformasikan jadwal BST juga Kadesnya menyuruh desa turun langsung ke desa-desa.” (Wawancara, Ridho, 23 November 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Batusari dalam merespon masalah memiliki kesadaran yang tinggi sehingga Kepala Desa Batusari dalam merespon keluhan masyarakatnya secara cepat tanggap. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Fahmi (2018) bahwa kualitas pemimpin yang baik yaitu pemimpin mampu memahami suatu masalah dengan memberikan keputusan atau respon yang terbaik untuk permasalahan tersebut.

### **C. Tantangan Dalam Koordinasi dengan Pihak-pihak yang Terlibat Pada Program BST**

Kepala Desa Batusari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST). Koordinasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan kegiatan antara badan, instansi, unit dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk saling membantu, mengisi, dan melengkapi pencapaian suatu tugas tertentu. Sama halnya dengan kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Demak, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mranggen (TKSK Mranggen), Pos Indonesia Cabang Mranggen, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Koordinasi tersebut dilakukan untuk melancarkan kegiatan penyaluran BST pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Hal yang saya dan Kepala Desa Batusari lakukan agar program BST ini berjalan dengan lancar karena yang pertama adanya komunikasi dan koordinasi yang terus berjalan selama penyaluran BST. Saya terus memberikan laporan pada Pak Sutikno baik proses atau kendala di Desa Batusari. Contohnya seperti saat ada *miss communication* dengan RT/RW langsung saya lapor pada Kades, alhamdulillah beliau cepat tanggap dan segera mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut saya,

kuncinya itu pada koordinasi dan komunikasi yang baik dan secara terus menerus.” (Wawancara, Latief, 17 November 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Batusari telah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pos Indonesia dalam mengatasi suatu masalah. Koordinasi lainnya dibuktikan dengan rencana yang telah disusun dengan matang dan bersifat terbuka dengan pihak-pihak yang terlibat pada proses penyaluran BST. Rencana tersebut yaitu penjadwalan pengambilan BST bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), koordinasi dengan satgas penanggung jawab di lapangan, dan petugas keamanan BST. Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa Batusari juga menggunakan komunikasi secara informal dengan masyarakat desa. Hal tersebut karena sudah menjadi karakter Kepala Desa Batusari yang apa adanya, sehingga masyarakat desa merasa nyaman ketika berinteraksi langsung dengan Kepala Desa Batusari. Koordinasi dengan poin-poin tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Batusari.

“Saat pengambilan BST itu kan ada Kepala Desanya, beliau meminta kami masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk tertib dalam pengambilan BST. Disamping pemantauan Kepala Desa, beliau juga sempat berkomunikasi dengan saya dan warga lain. Dengan menggunakan Bahasa Jawa, Kades bertanya ada tidaknya masalah di lingkungan sekitar kami, pokoknya pertanyaan beliau seputar kondisi masyarakat Desa Batusari.” (Wawancara, Dewi, 17 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa, Kepala Desa Batusari dalam berinteraksi dengan masyarakatnya menggunakan bahasa daerah yaitu Bahasa Jawa. Bahasa Jawa digunakan masyarakat Desa Batusari untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari, sehingga ketika berinteraksi menggunakan bahasa informal akan terasa lebih nyaman dibandingkan menggunakan bahasa formal yaitu Bahasa Indonesia.

Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) melakukan pengawasan dengan memantau kinerja bawahannya dalam proses pendataan maupun penyaluran BST. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Terkait pada pengawasan, Kepala Desa Batusari dalam melakukan pengawasan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan pemantauan langsung (turun ke lapangan) di Aula Balai Desa Batusari pada pelaksanaan penyaluran BST. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan ketika Kepala Desa

Batursari mendapatkan laporan-laporan kegiatan baik dengan perangkat desa, Pos Indonesia, dan TKSK.

“Pengawasan itu harus dilakukan karena sangat penting untuk melihat progresnya sudah sejauh mana, apakah ada kendala-kendala di lapangan atau tidak, apakah dengan melakukan penjadwalan yang sudah direncanakan ini sudah efektif atau tidak. Pengawasan tidak langsung juga sangat perlu karena tugas saya sebagai Kepala Desa bukan hanya untuk mengelola BST, namun masih banyak kegiatan-kegiatan desa yang harus saya urus dan kunjungi. Jadi, ketika waktu saya tidak mencukupi untuk ikut hadir dalam penyaluran BST, saya meminta laporan pengawasan dari pihak yang terlibat.” (Wawancara, Sutikno, 17 November 2022).

Kepala Desa Batursari dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak ketiga sudah cukup baik, seperti menjalankan tugasnya yaitu membuat laporan evaluasi kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Demak, bekerja sama dengan TKSK Mranggen, Pos Indonesia Cabang Mranggen, dan lembaga kemasyarakatan desa. Meskipun mengalami beberapa permasalahan salah satunya yaitu *miss communication* antara pihak Pos Indonesia dengan RT/RW yang menyebabkan jadwal penyaluran BST bertabrakan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Kepala Desa Batursari harus lebih baik dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan dijadikan evaluasi untuk program-program bantuan sosial kedepannya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab penutup peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang bersangkutan pada laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami makna dan inti dari pembahasan penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepemimpinan Kepala Desa Batusari dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 yaitu lebih berorientasi pada hubungan (*relationship oriented*) karena keefektifannya dalam membangun hubungan dengan bawahannya dengan melakukan sosialisasi yang baik pada perangkat desa, pihak ketiga (Dinsos Kabupaten Demak, TKSK Mranggen, Pos Indonesia, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan masyarakat Desa Batusari. Selain itu, Kepala Desa Batusari memiliki sifat terbuka pada semua masyarakat desa sehingga masyarakat merasa nyaman ketika mengadu atau memberi usul pada Kepala Desa. Hubungan dengan perangkat desa juga diakui Kepala Desa Batusari sudah seperti keluarga. Selain itu, Kepala Desa Batusari mampu mengelola konflik yang terjadi dengan baik.
2. Kepala Desa Batusari dalam mengelola BST Tahun 2021 menghadapi beberapa tantangan, yaitu komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat yang cukup baik, namun dengan RT/RW Desa Batusari masih kurang baik karena jumlah RT/RW yang tergolong banyak, pemberian keputusan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Batusari yaitu terjadinya kecemburuan sosial pada masyarakat desa yang tidak mendapatkan BST. Kepala Desa Batusari melakukan inisiatif dengan pemberian pesangon melalui dana pribadinya pada masyarakat desa yang tidak terdaftar DTKS, dan Kepala Desa Batusari melakukan koordinasi yang cukup baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BST. Meskipun masih terjadi *miss communication* antara RT/RW dengan pihak pos.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kepala Desa Batursari diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan RT/RW setempat dengan memberikan pengaruh yang positif agar tidak sering terjadi *miss communication* dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan RT/RW dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih maksimal.
2. Diharapkan bagi masyarakat Desa Batursari agar lebih *open minded* atau berpikiran secara terbuka terkait kegunaan dan kriteria bantuan sosial yang diberikan pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan kecenderungan untuk menggantungkan dana bantuan sosial untuk membayar keperluan yang tidak dianjurkan oleh pemerintah.
3. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Demak diharapkan untuk selalu memperbarui DTKS agar data yang lama tidak menumpuk sehingga persebaran KPM tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. (2022, November 17). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Adela Vina, A. S. (2022). Rezim Tata Kelola Desa (Studi Kasus: Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak).
- Ademulales, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Tahun 2020. *repository ummat*, 1-64.
- Ali, E. M. (2013). *Kepemimpinan Integratif Dalam Konteks Good Governance*. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Alim, N. (2022, November 24). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Annas, A. (2014). *Interaksi Atasan Dengan Bawahan Dalam Pengambilan Keputusan di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Makassar.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Badeni. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: ALFABETA.
- Batusari, D. (n.d.). *Sejarah Desa*. Retrieved from Desa Batusari Kabupaten Demak: <http://batusari.desa.id/sejarah-des>
- bisnis.com. (2020, Agustus 16). *Salurkan Bansos Tunai Hingga Pelosok Pos Indonesia Diapresiasi*. Dipetik November 2022, 19, dari Bisnis.com: <http://m.bisnis.com/amp/read/20200816/15/1279849/salurkan-bansos-tunai-hingga-pelosok-pos-indonesia-diapresiasi>
- Chofifah Nur Azizi, T. L. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan BST di Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Muntang Kabupaten Purbalingga. *ejournal unri*, 1-11.
- D. (2022, November 24). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)

- Dewi. (2022, November 17). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Fahmi, I. (2018). *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Faqih. (2022, November 25). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Fiedler, F. E. (1967). *A Theory of Leadership Effectiveness*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Fiedler's Contingency Theory*. (2000). Retrieved 11 16, 2022, from Pareto Labs: <https://www.paretolabs.com/fielders-contingency-theory/>
- Hardiyansah, H. (2017, November 13). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Dipetik December 2022, 4, dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <http://www.bkpsdmd.babelprov.go.id>
- J. (2022, November 25). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Jayani, D. H. (2021, September 15). *Capai 4,17 Juta, Kasus Covid-19 Indonesia Tertinggi Keempat di Asia*. Retrieved October 11, 2022, from Databoks Indonesia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/capai-417-juta-kasus-covid-19-indonesia-tertinggi-keempat-di-asia>
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompas.com. (2021, Juli 18). *Pemerintah Perpanjang Bansos dari BST hingga Subsidi Kuota Internet*. Dipetik November 19, 2022, dari KOMPAS.com: <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/060700026/pemerintah-perpanjang-bansos-dari-bst-hingga-subsidi-kuota-internet-simak?amp=1&page=2>
- Laras Tri Wahyuji, N. A. (2013). Pendekatan Situasional. *Lecture UB*, 8-13.
- Latief. (2022, November 17). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)

- Malau, M. (2020). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19*.
- Maxwell, J. C. (2013). *Developing The Leaders Around You*. Surabaya: Mic Publishing.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngawi, K. (2019). *Syarat dan Tata Cara Mendapatkan BST Akibat Covid-19 Dari Pemerintah*. Dipetik 11 15, 2022, dari Kominfo Ngawi: <https://kominfongawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah>
- Punca. (2022, November 17). *Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST)*. (S. S. Putri, Interviewer)
- R. (2022, November 23). *Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST)*. (S. S. Putri, Interviewer)
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. *pository uin malang*, 1-28.
- RI, K. (2020). *Keputusan Menteri Sosial RT Nomor 54/HUK/2020*. Retrieved 10 12, 2022, from <http://ppid.temanggungkab.go.id>
- Richard L. Hunghes, R. C. (2012). *Leadership: Enhancing the Lesson of Experience*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rini. (2022, November 25). *Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST)*. (S. S. Putri, Interviewer)
- Rosadi, N. C. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang*. 1-168.
- Sartono. (2022, November 24). *Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST)*. (S. S. Putri, Interviewer)
- Satrijani Koesbandijah, W. T. (2013). *Relasi Gender Dalam Komunitas Miskin Dukuh Kayon Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. *Journal of Educational Social Studies*, 1-8.



- Setiawan, K. (2020, November 1). *Tahun 2021, Kemensos Akan Lanjutkan Bansos Tunai untuk 10 Juta KPM*. Retrieved October 12, 2022, from Kementerian Sosial Republik Indonesia: <http://kemensos.go.id>
- Siagian, S. P. (1997). *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Statistik, B. P. (2021). *Kecamatan Mranggen Dalam Angka*. Kabupaten Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)*. Retrieved October 11, 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukoco, N. D. (2021). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. *Repsitory IAIN Purwokerto*, 13-20.
- Surni. (2022, November 24). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Sutikno. (2022, November 17). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Syaodih, N. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syarifudin, E. (2004). Teori Kepemimpinan. *media neliti*, 459-477.
- Thoha, M. (2009). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik. (2022, November 23). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- UMA. (2022). Kenali Apa itu RT/RW. *Jurnal Uma*.

- UNDIP, K. T. (2022, September 1). *Peta Titik Lokasi Posyandu Desa Batursari*. Dipetik December 7, 2022, dari Kompasiana: <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/krisnadm20/63103f0fdbfe1753562e8023/seringkali-dibuat-bingung-mahasiswa-kkn-tematik-undip-membuat-peta-titik-lokasi-posyandu-desa-batursari>
- Veithzal Rivai, D. M. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widyaningrum, M. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo)”. 1-44.
- William, Z. I. (1994). *International Multilateral Negotiation*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Y. (2022, November 25). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaky. (2022, October 2). Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai (BST). (S. S. Putri, Interviewer)
- Zega, C. (2020). Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. 1-42.
- Zulaihah, I. (2017). Contingency Leadership Theory/ Pendekatan Situasional. *ejournal unuja*, 76-87.

## LAMPIRAN

### Gambar 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2618/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022 15 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Pra Riset

Yth.  
Kepala Desa Batusari  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** yang berjudul **Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan Data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Selly Sekarharum Putri  
NIM : 1906016058  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 Maret 2001  
CP/e-mail : 085903703530/ [sellysekar27@gmail.com](mailto:sellysekar27@gmail.com)  
Nama Ayah/ Ibu : Frandy  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Plamongan Indah Blok D, Kec. Mranggen, Kab. Demak

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Gambar 5 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2618/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022 15 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Pra Riset

Yth.  
Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mranggen  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** yang berjudul **Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mengelola Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan Data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Selly Sekarharum Putri  
NIM : 1906016058  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 Maret 2001  
CP/e-mail : 085903703530/ [sellysekar27@gmail.com](mailto:sellysekar27@gmail.com)  
Nama Ayah/ Ibu : Frandy  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Plamongan Indah Blok D, Kec. Mranggen, Kab. Demak

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

Gambar 6 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2317/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2022 12 Oktober 2022  
Lamp : -  
Hal : Pra Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul **Kepemimpinan Politik Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Batusari, Kab. Demak** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan Data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Selly Sekarharum Putri  
NIM : 1906016058  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang/ 24 Maret 2001  
CP/e-mail : sellysekar27@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Anita Trini Hayati  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Plamongan Indah Blok D17 Nomor 16, Kec. Mranggen, Kab. Demak

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan  
Kasub. bag Akademik  
  
H. Gurawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

**Gambar 7 Dokumen Laporan Normatif Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**

**DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI  
PEMROV JAWA TENGAH TAHUN 2021**

Provinsi: JAWA TENGAH MASA BAYAR 1  
Kabupaten: DEMAK RW.08  
Kecamatan: MIRANGSEN  
Kantor Pos: BATURSARI  
No. Daftar: 3321012007

AUGUST YULIANTO  
(nama penerima pertama di daftar nominatif)  
50000 - SEMARANG  
55057 - Mlanggan

NO	NIK / NAMA	ALAMAT	NOMOR BARCODE BST	BESAR UANG	YTD / TGL BAYAR	NO HP
1	3321010078000 AUGUST YULIANTO	JALAN PERBATA BATURSARI BL. DK. A27 BATURSARI RWART000000	6U730210100780000 1 x 200000	200.000	16 SEP 2021	
2	332101103700003 TRYONO	JALAN KERON PELAM SELATAN NO 15 RT 05 RW 11 RWRT000000	6U7302101103700003 1 x 200000	200.000		
3	332101100100001 LINA ROSTA NUGRAHA	JALAN PUCANG ELOK 6 NO 4 RT 04 RW 23 RWRT000000	6U7302101100100001 1 x 200000	200.000	16 SEP 2021	
4	332101500670000 YAMDAH	JALAN PUCANG KARYA NO 10 RT 04 RW 15 PUCANG GADING RWRT000000	6U7302101500670000 1 x 200000	200.000		
5	3321014710720002 SRI PURWANTI	JALAN PUCANG SANTOSA PENGANG V14 MIRANGSEN DEMAK RWRT000000	6U73021014710720002 1 x 200000	200.000		
6	3321040000000000001 AGUS SUPRIYANTO	JALAN PUCANGGADING RT 04 NO 10 BATURSARI MIRANGSEN KALIPATEN DEMAK RWRT000000	6U7302104000000000001 1 x 200000	200.000		
7	3321012704000000 MUHAMMAD DAFFA ISHDAQ PELLAH	J. KALIMAN PUCANGGADING BATURSARI NO 16 RWRT000000	6U730210127040000000 1 x 200000	200.000		
8	332101111990000 RIFAN FAHRI	J. KH. NASIR PUCANG GADING RT 02 RW 09 RWRT000000	6U730210111990000 1 x 200000	200.000		
9	332101202050000 KANK SUPARMINI	J. PUCANG ADI NO 26 BATURSARI KECUMANGSARI KAB DEMAK RWRT000000	6U7302101202050000 1 x 200000	200.000	16 SEP 2021	
10	332101502830004 NELYSA MASTIA	J. PUCANG ADI 15 RWRT000000	6U7302101502830004 1 x 200000	200.000	16 SEP 2021	
Jumlah		10				

CAP POS  
Diperiksa oleh  
Petugas Pos  
Nippos.

**Gambar 8 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Batursari**





**Gambar 9 Dokumentasi Wawancara Dengan Kaur Perencanaan**



**Gambar 10 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mranggen**



**Gambar 11 Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Desa Batusari**



**Gambar 12 Dokumentasi Acara Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Selly Sekarharum Putri

TTL: Semarang, 24 Maret 2001

Alamat: Plamongan Indah Blok D17 No.16, Kabupaten Demak

NIM: 1906016058

Jurusan: Ilmu Politik

Fakultas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Agama: Islam

Email: [sellysekar27@gmail.com](mailto:sellysekar27@gmail.com)

No. HP: 085903703530

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD Negeri Pedurungan Kidul 01 (2007-2013)

SMP Kesatrian 1 Semarang (2013-2016)

SMA Kesatrian 2 Semarang (2016-2019)

### **RIWAYAT ORGANISASI**

Staff Ahli SEMA FISIP (2020)

Anggota Divisi Infokom FORSHA (2021)